



LAPORAN
EVALUASI
PELAKSANAAN RKPD DAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NTB
TRIWULAN II TAHUN 2021

BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

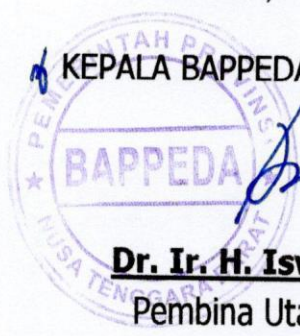
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan II tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi NTB pada Triwulan II tahun 2021 berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 16 indikator (43,24%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 21 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 16 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan II 2021 tersebut terdapat 6 indikator (16,22%) sudah memenuhi target. Secara umum rendahnya capaian di triwulan II ini disebabkan oleh sebagian besar belum dapat diukur sampai triwulan II, adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran, serta sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam proses penyelesaian tender dan Pelaksanaan kegiatan diagendakan pada triwulan III dan IV.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Juli 2021

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP : 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, untuk mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 751 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.834.225.973.367,64 atau 51,26% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp.5.528.931.855.427.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran pada Triwulan II tahun 2021, dapat dideskripsikan bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, terdapat 120 program prioritas pembangunan daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 30,73% dan realisasi keuangan sebesar 21,14%. Sedangkan dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan. Sebanyak 557 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya. Rata-rata capaian kinerja sebesar 39,21% dan realisasi keuangan sebesar 29,49%.

Adapun capaian berdasarkan sasaran pembangunan daerah, dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 16 indikator (43,24%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 21 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 16 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan II 2021 tersebut terdapat 6 indikator (16,22%) sudah memenuhi target yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi; Persentase konektivitas transportasi publik; Opini BPK; Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan; Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan Rasio Elektrifikasi. Meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the right track*. Sedangkan Capaian terhadap Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada triwulan II

tahun 2021 secara keseluruhan dari 103 indikator terdapat 11 indikator (10,68%) tercapai, 17 indikator (16,50%) belum memenuhi target dan masih terdapat 75 indikator (72,82%) belum dapat dihitung/diukur karena baru dapat dihitung diakhir tahun dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Rendahnya capaian di triwulan II ini disebabkan oleh sebagian besar belum dapat diukur sampai triwulan II, adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran, serta sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam proses penyelesaian tender dan Pelaksanaan kegiatan diagendakan pada triwulan III dan IV.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **Error! Bookmark not defined.**

RINGKASAN..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 4

 1.1 Latar Belakang 4

 1.2 Landasan Hukum 5

 1.3 Tujuan 5

 1.4 Sasaran 6

 1.5 Sistematika Penulisan Laporan 6

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021 7

 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 7

 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021..... 8

 2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021..... 9

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN
DAERAH DAERAH TAHUN 2021.....13

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
TRIWULAN II.....33

 4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada
 Triwulan II Tahun 2021 33

 4.2 Permasalahan..... 88

BAB V : PENUTUP89

 5.1 Kesimpulan 89

 5.2 Rekomendasi..... 90

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan II tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2021 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;

3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2021.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2021. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2021. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan II Tahun 2021. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2021 sampai Triwulan II.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi :
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :

- a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
 - b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.
 - c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
 - e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.
3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :
- a. Mengendalikan inflasi.
4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
 - b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
 - e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2021 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan
Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			Point	123.11
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	78.56
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	71.97
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31.49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.39
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui	Terwujudnya lingkungan hidup dan	Indeks Kualitas			Point	67.72
				Meningkatnya Kualitas, Daya	Indeks Kualitas Air	Point	42.83

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
	pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Lingkungan Hidup (IKLH)	Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70
			Neraca pengelolaan sampah			%	70.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	73.80
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273
		Terwujudnya pariwisata	Pertumbuhan sektor			%	1.50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
		yang dapat diandalkan	kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	6.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.85
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
			Partisipasi politik masyarakat			%	83.74
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59.81
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2021

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2021 sebanyak 120 program dari 163 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan
Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun Program prioritas dan program unggulan daerah yang dipetakan berdasarkan prioritas daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi :

- a. Mitigasi bencana.
- b. Infrastruktur dasar.
- c. Infrastruktur kawasan.
- d. Konektivitas wilayah.
- e. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain: Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Benderang.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik , dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain: eNTeBe Plan, NTB SDGs *centre, Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, e-Samsat, Samsat Delivery, Bale Mediasi, Kampung Madani, Kampung Media, Sekolah Perjumpaan, NTB Satu Data, Satu Peta, Sakip level A, NTB *care*, Kota Layak Anak, Ramah *Difable*, Manajemen Talenta dan Agen Perubahan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan
- c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi:

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB *Zero Waste*, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.

5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan investor sektor riil
- c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan, Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.

6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
- c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
- d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, , Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran
Pembangunan Pada Tahun 2021

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	123.11		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	25.48	4,159	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	44.69		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,446	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	78.56		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	83.95	255,582	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74.55	172,161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	50.83	4,436	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	94.37		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	30		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	46.20		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	59.39	564	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	711,669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,050	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	60	1,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	80	1,079	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	40	2,119	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	5.55	397	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	95	1,571	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	35.20	528	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	50.12	14,608	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,234	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	11,089	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP- nya	%	84.44	827	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	17,77	717	INSPEKTORAT

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%	80	1,148	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	2,834	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	6,500	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,446	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.03		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.13		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.55		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,70	243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	15	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	60	4,644	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	45	1,707	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	20	420	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	30	409	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	75	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	977	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang			Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	71.97		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	150,430	Dinas Kesehatan
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	65		
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	80		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2	761	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	30	32	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	83	52,458	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	73.81	7,479	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75.00	36,664	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	31.49		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	12.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	50	1,228	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.39		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.15	473,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	93,40		
	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	96.68		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69.4		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1.01		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:14		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	568	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	66,961	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.55		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	70		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	50		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		5.5		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	8,846	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67.72		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	51.52	319	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	20	188	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	197	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	67	19,206	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	885	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	13.27	661	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,449	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.07	681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	70.00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	70	4,823	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	73.80		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	3	493	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	87	531	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	50	735	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	116	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9	44,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	561	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,779	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	420	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	1.93	20,209	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	35.41	104,379	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95.5	361	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	50	5,432	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.53	4,868	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	241,843	6,336	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,195,104	3,023	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.91	4,852	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	213130	616	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	764	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	2.5	17,317	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,091	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	71.97	215	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,517	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	80.00	539	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76.48	2,936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.10		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,393	256,813	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.77		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.96	557	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99.77	1,552	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	1,943	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.81		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	60	280	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,658	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	3	1,303	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	80	1,253	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,024	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,273		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	3,704	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	1.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	122.71		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	65.66	4,993	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	37.5		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang	4,650,000	2,240	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%	30.21	165	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	60	1,063	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	6.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	166.39		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	27,070	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	2.69	799	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem	%	1	540	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Informasi Industri Nasional				
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	5.99	1,280	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	50.32	2,122	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	16	830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	44.71	992	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1,014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.85		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	458	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10	3,328	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	87,427	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	60	6,798	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	14.43		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	60		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	47.86		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	63.64	1,975	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	390	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	164	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	2,864	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	51.72	730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,711	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	83.74		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	80	4,654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	79.66	489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59.81		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.6		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	60		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	1,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	806	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	381	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	361	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		518	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 TRIWULAN II

4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2021

Sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 269 kegiatan dan 751 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.834.225.973.367,64 atau 51,26% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp. 5,528,931,855,427. Adapun total realisasi anggaran sampai triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp. 1.620.695.218.074,08 atau 29,68% terhadap total APBD dan 29,33% terhadap total anggaran RKPD.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai triwulan II tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 30,73% dengan capaian keuangan sebesar 21,14%. Rendahnya capaian ini disebabkan sebagian besar belum dapat diukur sampai triwulan II, adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran serta pelaksanaan kegiatan diagendakan pada triwulan III dan IV.
2. Dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan. Sebanyak 557 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya. Rata-rata capaian kinerja sebesar 39,21% dan realisasi keuangan sebesar 29,49%

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 16,65 % pada capaian kinerjanya dan 28,94 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna dengan target kinerja 25,48% dan 44,69%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (sub kegiatan : Penguatan

- Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penanganan Pascabencana Provinsi, Penyusunan Rencana Kontijensi), Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (sub kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Pencarian, Pertolongan, Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana) dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (sub kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan). Dengan adanya refocusing anggaran, pembentukan DESTANA terkoreksi dari 20 Desa menjadi 10 Desa. Meskipun ada penurunan target, tetapi ada dukungan dari Kabupaten untuk pembentukan DESTANA sebanyak 7 Desa, yang terdiri dari KLU 4 Desa, Lombok Barat 1 Desa, Lombok Timur 1 Desa dan Lombok Tengah 1 Desa.
- b. Program Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.
2. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 24,42 % dengan realisasi anggarannya rata-rata sebesar 27,79%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan target kinerja sebesar 83,95%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
3. **Sasaran Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 41,21 % dan capaian keuangannya rata-rata sebesar 25,63%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 74,55%. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi;

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi) dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;Rehabilitasi Bendung Irigasi;Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;Operasional Unit Pengelola Irigasi).

4. **Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Rata-Rata Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan sebesar 28,85 % dengan capaian keuangannya rata-rata sebesar 11,19%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 50,83 %), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 94,37 %), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 30 %), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 46,2 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan

- Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).
- b. Program Program Pengelolaan Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasarana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan

Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

- 5. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** dengan indikator kinerja Opini BPK. Rata-Rata Capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 79,38 % dan 21,24 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 %), Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
 - b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

- 6. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 28,54 % pada capaian kinerjanya dan 26,22 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal dengan target kinerja 35.2 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) dengan target kinerja sebesar 50.12 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 37,46% dengan capaian keuangannya sebesar 33,72%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja 100 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (dengan sub kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi); Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan: Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota); Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA); Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan).
- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya dengan target kinerja sebesar 84.44%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; dan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota.
 - d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 17,77%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi

- dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat dengan target kinerja yaitu Nilai BB. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan (sub kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi; Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan Penataan Analisis Jabatan) dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik).
 - f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan; Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum; dan Fasilitasi Penataan Wilayah), Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan; dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan) dan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah; Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama).

8. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 85,06% pada capaian kinerjanya dan 46,45% pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%); Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan (target capaian: 80%); Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi (target capaian: 88%); Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan 132%); dan Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (sub kegiatan : Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian); Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; dan Pengelolaan Promosi ASN); Kegiatan

Pengembangan Kompetensi ASN (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional), Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN).

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja : 0.086%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja : 0.033%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja : 0.13%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi(target kinerja : 0.55%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 51,16% dengan capaian keuangan rata-rata sebesar 28,55% pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk (target capaian: 98,7%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional; dan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk; dan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk).
- b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; dan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi); Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan).

- d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir (target capaian: 15%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (target capaian: 60%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK (target capaian: 45%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik).
- g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah).
- h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%) (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).

- i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
- k. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi).
- l. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam); Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (sub kegiatan : Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah); Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan).

10. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 50,42% dengan rata-rata keuangan mencapai 34,89%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (target capaian: 85%), Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (target capaian: 97%); Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar (target capaian: 65%); Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (target capaian: 100%); Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target capaian: 80%); Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (target capaian: 94%); dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan

- Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan) ; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (target capaian: 2%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (sub kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan); Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan).
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (target capaian: 30%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional).
 - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 83%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan.
 - e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 73,81%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah

Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit); dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

11.Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 41,5% dengan capaian keuangan rata-rata sebesar 31,93%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting (target capaian: 12,41. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (target capaian: 50%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi); Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM).

12.Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target: 13,68 Tahun) dan Rata rata Lama Sekolah Target : 7,01 Tahun). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 27,91% pada capaian kinerja dan 26,02 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

- (Target kinerja : 99.15 %); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 93,408 %); Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja : 96.68%); Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja : 69.4%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja : 1.01 %); Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah (Target kinerja : 1:18); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja : 1:14). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).
- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja : 99.15%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 100%); Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 99.55%); Persentase Kepala Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 70%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 50%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja : 5,5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan (Target kinerja : 35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.
- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event); Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan).

13. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 26,29% dengan capaian keuangan sebesar 30,65%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Target kinerja : 51,52 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya (Target kinerja : 10 lokasi). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi); Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan (sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Target kinerja : 1 lokasi). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- dengan indikator Kinerja Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (Target kinerja : 210 unit). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan (Target kinerja : 20 kegiatan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan (Target kinerja : 105). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Target kinerja : 20 Pengaduan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

14.Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air ,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 34,55% dan capaian keuangan sebesar 29,08% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi kelola (Target kinerja : 66,74 %) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja : 10 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana

- Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja : 30503.3 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).

- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya (Target kinerja : 13,27%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas (Target kinerja : 4 DAS). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.
- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Target kinerja : 89,07%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).

15. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 38,00% dengan capaian keuangannya sebesar 40,10%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah (Target kinerja : 70 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional).

16.Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 62,71% dengan capaian keuangannya sebesar 38,98%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Perentase Peningkatan Minat Investasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman); dan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi; dan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi).
- b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Target kinerja : 87 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota (sub kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); dan Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi (sub kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik; Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan).
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja : 50 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja

Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

17.Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 45,91% dengan capaian keuangan sebesar 59,05%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak (Target kinerja : 9 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit

- Ternak dan Rumpun/Galur Terna; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak)
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi Phms (Target kinerja : <1%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).
 - d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani;Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).
 - e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Sarana Pertanian (Target kinerja : 1,93%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).

- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
- g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).
- i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan

- Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).
- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Target kinerja : 8,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).
- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap (Target kinerja : 241843 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan

- Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).
- l. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya (Target kinerja : 1195104 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
 - m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,91%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil)
 - n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan (Target kinerja : 213130 ton). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam

(satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi; dan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

18.Sasaran Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk

miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 20,00% dengan capaian keuangan sebesar 20,42%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (Target kinerja : 85 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan

- Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja : 2,5 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar ; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu

Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (sub kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI; Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal); dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat).

19.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan

dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 100,00 % dengan capaian keuangan sebesar 77,64 %. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan (Target kinerja : 71,97%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (sub kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan); Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi); Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi (sub kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)).
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) (Target kinerja : 5,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan

pangan (%) (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi; Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).

20.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 84,71% dengan capaian keuangan sebesar 1,43%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum (Target kinerja : 76,48%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.

21.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 39,00 % dengan capaian keuangan sebesar 36,82%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (Target kinerja : 94%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas (Target kinerja : 84392,8 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

22.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 32,43% pada capaian kinerjanya dan 43,84% capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik (Target kinerja : 5,96%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar

- Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).
- b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Target kinerja : 99,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan).

23.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 19,25% dengan capaian keuangan sebesar 26,52%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi);

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

- 24.Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok** dengan Indikator Kinerja Inflasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 51,14% dengan capaian kinerjanya keuangannya sebesar 20,50%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui:
- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting" (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya); Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana) (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA).
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Target kinerja : 4%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah

- Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida;Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi;Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).
- c. Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang (Target kinerja : 3%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan ; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor).
 - d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen;Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen_; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).
 - e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

25.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Indikator Kinerja Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 30%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

- 26.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata** dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 7,73 % dengan capaian keuangan sebesar 24,14%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Persentase desa wisata yang dikembangkan (Target kinerja : 65,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).
 - Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan (Target kinerja : 4.650.000 orang). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif (Target kinerja : 30,21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan sub kegiatan Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik ; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.

27.Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 19,8% dengan capaian keuangan sebesar 19,9%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 5,99%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan

- Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 50,32%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
 - f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator Kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 34,46% dengan capaian keuangan sebesar 20,67%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi (Target kinerja : 16%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (sub kegiatan : Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (Target kinerja : 44,71%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan : Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL

- Antar Kerja Lokal)); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja); Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan);Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).
- c. Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi ; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).
- d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan;Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan).

29.Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 25,35% dengan realisasi keuangan sebesar 23,23 %. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan

- Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
 - c. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu

- Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja : 63,64%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat)
 - f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
 - g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

30. Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 31,20% dengan realisasi keuangan sebesar 31,29%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target kinerja : 100%). Adapun

- kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS).
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Target kinerja : 51,72%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- c. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk; Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi ;Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi;Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat; Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun ; Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi; Persentase

Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota); dan Bantuan Hukum dan HAM (sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; dan Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM).

31.Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 30,83% dengan realisasi keuangan sebesar 20,83%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Ormas yang aktif (Target kinerja : 79,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

32.Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,83% dengan capaian keuangan sebesar 6,59%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG (Target kinerja : 52,17%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi)
- b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (Target kinerja : 75,52%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

**Tabel : Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja Dan Keuangan berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 sampai Triwulan II
(sebagaimana disajikan terlampir)**

4.2 Pencapaian Indikator RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 pada Triwulan II Tahun 2021

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD):

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama sebagai berikut: Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Pelayanan Publik, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Inflasi, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

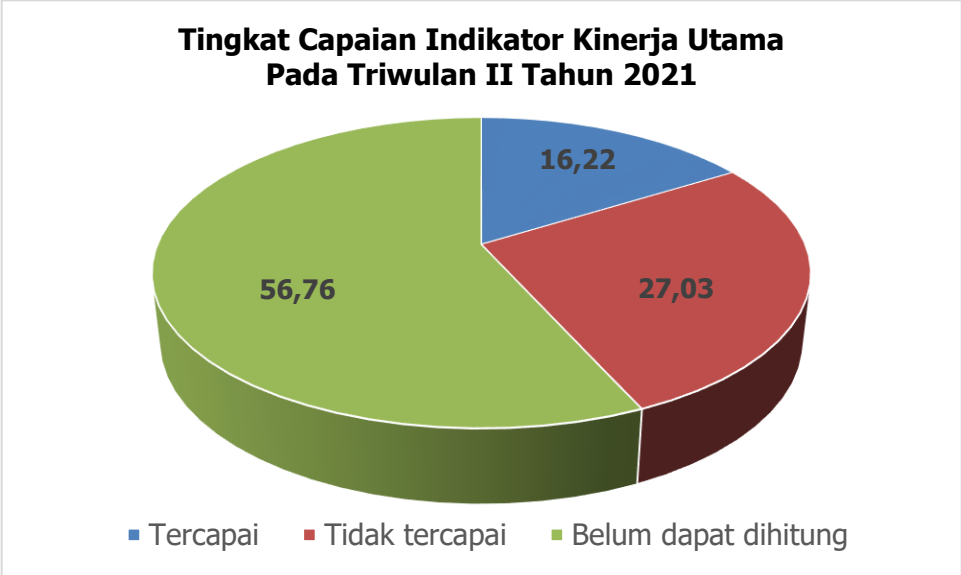
Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap sasaran pembangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator	2021		
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah				
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,00	0,00
2	Persentase Kemantapan jalan	83,95	70,91	84,47
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	50,04	66,00	131,89
4	Persentase konektivitas transportasi publik	81,71	86,00	105,25
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi				
5	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	35,41	33,28	94,54
7	Nilai SAKIP	BB (73,01 - 76,00)	0,00	0,00
8	Indeks Profesionalisme ASN	0,68	0,00	0,00
9	Indeks Pelayanan Publik	4,23	0,00	0,00
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah				
10	Angka Harapan Hidup	66,78	0,00	0,00

No	Indikator	2021		
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
11	Persentase Balita Stunting	31,49	0,00	0,00
12	Harapan Lama Sekolah	13,68	0,00	0,00
13	Rata rata Lama Sekolah	7,01	0,00	0,00
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan				
14	Indeks Kualitas Air	42,83	0,00	0,00
15	Indeks Kualitas Udara	87,53	0,00	0,00
16	Indeks Kualitas Air Laut	87,60	0,00	0,00
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,70	0,00	0,00
18	Persentase Penanganan Sampah	50,00	34,48	68,96
19	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	7,35	36,75
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi				
20	Nilai Realisasi Investasi	13.362	4412,20	33,02
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	23,52	22,88	97,28
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,20	0,00	0,00
24	Cakupan Air Minum	76,48	0,00	0,00
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	80,10	80,20	100,12
26	Rasio Elektrifikasi	99,77	99,98	100,21
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	62,65	0,00	0,00
28	Inflasi	3,0 - 4,0	0,39	13,00
29	Pengeluaran per kapita	11.273,02	0,00	0,00
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	122,71	-87,42	-71,24
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	166,39	23,09	13,88
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30	3,97	79,70
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan				
33	Persentase penurunan konflik sosial	16,67	0,00	0,00
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5,41	0,00	0,00
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,80	0,00	0,00
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	18,60	0,00	0,00
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	60,00	0,00	0,00

Dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 16 indikator (43,24%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 21 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 16 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan II 2021 tersebut terdapat 6 indikator (16,22%) sudah memenuhi target yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi; Persentase konektivitas transportasi publik; Opini BPK; Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan; Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan Rasio Elektrifikasi.

Meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the right track*.

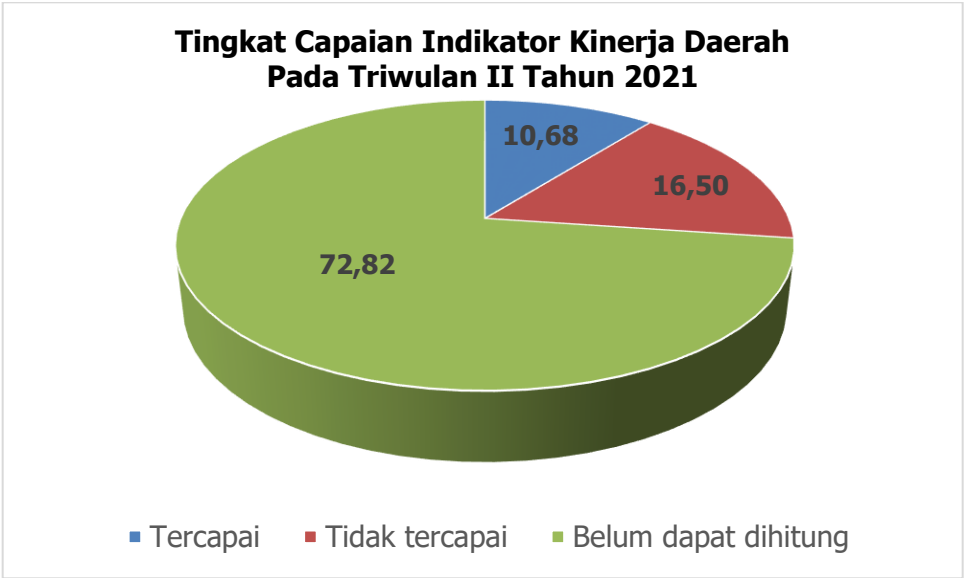


2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan dan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Biji Logam, Inflasi, Angka Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); aspek daya saing daerah dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ketaatan Terhadap RTRW, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik; serta aspek pelayanan umum diukur dengan 92 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 31 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 31 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 17 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 13 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Capaian terhadap Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2021 secara keseluruhan dari 103 indikator terdapat 11 indikator (10,68%) tercapai, 17 indikator (16,50%) belum memenuhi target dan masih terdapat 75 indikator (72,82%) belum dapat dihitung/diukur karena baru dapat dihitung diakhir tahun dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.



Deskripsi capaian Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	2.5-3.5	-1,81	-68,95
2	Inflasi	%	3.0 - 4.0	0,39	13,00
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,42	14,23	93,96
4	Gini Ratio	Point	0,353	0,386	90,78
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,84		

Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, seluruh indikator tersebut capaiannya tidak sesuai target. Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini sangat berdampak pada menurunnya aspek kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami kontraksi sebesar 1,81 persen. Kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi global covid-19 yang masih melanda sampai triwulan II tahun 2021 ini yang membuat ekonomi global, nasional, dan regional tertekan. Kontraksi terdalam dialami oleh Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,14 persen. Selain itu, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami kontraksi yang dalam sebesar 22,87 persen. Demikian juga dengan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang menjadi sumber pertumbuhan yang negatif sebesar 0,97 persen. Di sisi lain, Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 12,34 persen.

Pada indikator kemiskinan mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2020 tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen). Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 62 ribu jiwa, namun secara proporsi ada

penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2020 – Maret 2021 yaitu sebesar 0,09 persen poin. Akan tetapi, nilai ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen).

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,381. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,386. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,376, Gini Ratio Maret 2021 naik sebesar 0,005 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,413 mengalami kenaikan 0,008 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2020 dan naik sebesar 0,01 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,403. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,332, turun 0,004 poin dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,336. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 nilai ini turun 0,005 poin. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,35 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,84 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,27 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

b) Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,85		
2	Indeks Aksesibilitas	Point	78,56		
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,72		
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,03		
5	Indeks Risiko Bencana	Point	123,11		
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B		
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23		

Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah belum tersedia (*Not Available*) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

c) Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 38 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 13 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	62,39		
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68		
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01		
1.02	Kesehatan				
4	Indeks Kesehatan	Point	71,97		
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	77,00	83,23	108,09
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	80,2	100,12
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78		
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49		
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	83,95	70,91	84,47
11	Cakupan Air Minum	%	76,48		
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,04	66	131,89
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	9,09		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41		
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00		
17	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		
18	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	20,97		
19	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,61		
1.06	Sosial				
20	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00		
21	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,87		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,97	79,70
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,81		
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,46		
25	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,70		
26	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60		
27	Cakupan Kabupaten/KotaYang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00		
2.03	Pangan				
28	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,20		
2.04	Lingkungan Hidup				
29	Indeks Kualitas Air	Point	42,83		
30	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53		
31	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,60		
32	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	70,00		
33	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	34,48	68,96
34	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	7,35	36,75
2.05	Pertanahan				
35	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
36	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84		
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
37	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	29,01		
38	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	86,00		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
39	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04		
2.09	Perhubungan				
40	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	86	105,25
2.10	Komunikasi dan Informatika				
41	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif		
42	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
43	Persentase Koperasi Aktif	%	65,00	76,12	117,11
2.12	Penanaman Modal				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
44	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362	4.412,2	33,02
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
45	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35		
46	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	4	26,67
47	Proporsi wirausaha muda	%	68,18		
2.14	Statistik				
48	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30,00		
2.15	Persandian				
49	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+		
2.16	Kebudayaan				
50	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46		
51	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	24,35		
2.17	Perpustakaan				
52	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00		
53	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	31,89		
2.18	Kearsipan				
54	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67		
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
55	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75		
56	Produksi Perikanan	Ton	1.436.947	297.722	20,72
57	Nilai Tukar Nelayan	%	>110		
3.02	Pariwisata				
58	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	1,50		
59	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	60,00		
60	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,10	1,42	45,81
61	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.650.000		
62	Persentase Geosites yang Tertata	%	25,00		
63	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	122,71	(87,42)	(71,24)
3.03	Pertanian				
64	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	22,88	97,28
65	Nilai Tukar Petani	Point	>105	106,76	101,68
3.04	Kehutanan				
66	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
67	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	10,08		
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
68	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21
3.06	Perdagangan				
69	Indeks Daya Beli	Point	73,80		
70	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.273		
3.07	Perindustrian				
71	Pertumbuhan Industri	%	6,50		
72	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	166,39	23,09	13,88
73	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,69		
3.08	Transmigrasi				
74	Cakupan Penempatan Transmigran	%	90	56,25	60,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
75	Ranking Nasional LPPD	Ranking	7		
76	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
77	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00
78	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28,00		
79	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
80	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00		
5.02	Keuangan				
81	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100
82	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,50		
83	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35,41	33,28	94,54
5.03	Kepegawaian				
84	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
85	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25		
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
86	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	24,00		
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
87	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73.01 - 76.00)		
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	83,74		
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	30,00		
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67		
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80		

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 24 indikator (26,37%) tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 13 indikator belum memenuhi target, namun 3 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 80%. Dan masih terdapat 54 indikator belum tersedia (*Not Available*) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Persentase Koperasi Aktif, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, dan Opini BPK.

4.3 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan II Tahun 2021 sesuai dengan tabel berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2021, terdapat beberapa istilah program antara lain program prioritas, program unggulan, dengan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara nomenklatur berbeda satu sama lain dan memiliki level pengukuran yang sama dan tidak ada pemetaan yang menunjukkan keterkaitan satu sama lain;
2. Tidak tersedia penjabaran dan target yang akan dicapai pada setiap program prioritas dan program unggulan sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengukuran capaian pada setiap program prioritas dan program unggulan;
3. Rendahnya capaian di triwulan II ini disebabkan sebagai berikut:
 - a. Sebagian besar belum dapat diukur sampai triwulan II,
 - b. adanya penghentian sementara pelaksanaan kegiatan akibat refocusing anggaran
 - c. Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam proses penyelesaian tender
 - d. Pelaksanaan kegiatan diagendakan pada triwulan III dan IV.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, 120 program prioritas pembangunan daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 30,73% dan realisasi keuangan sebesar 21,14%. Capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I yang baru mencapai 7,83%
4. Dari 281 Kegiatan, terdapat 214 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangan dan kinerjanya. Dari 281 kegiatan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan. Sebanyak 557 diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya. Rata-rata capaian kinerja sebesar 39,21% dan realisasi keuangan sebesar 29,49%.
5. Dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 16 indikator (43,24%) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 21 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 16 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan II 2021 tersebut terdapat 6 indikator (16,22%) sudah memenuhi target yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi; Persentase konektivitas transportasi publik; Opini BPK; Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan; Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan Rasio Elektrifikasi. Meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the right track*.
6. Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintahan Provinsi NTB pada triwulan II tahun 2021 secara keseluruhan terdapat terdapat 11 indikator (10,68%) tercapai, 17 indikator (16,50%) belum memenuhi target dan masih terdapat 75 indikator (72,82%) belum dapat dihitung/diukur karena baru dapat dihitung diakhir tahun dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2021;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Perlu percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk mengefektifkan pencapaian kinerja dan anggaran;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala, agar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikendalikan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

**EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI NTB
TAHUN 2021
TRIWULAN II**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/Impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	5 Rp	K	6 Rp	K	7 Rp	K	8 Rp	K	9 Rp	K	10 Rp	11
Misi NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					1.296.833.405.454											
Tujuan : Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point	115,83	21.988.847.388	123,11										
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65	21.988.847.388	0,61										
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445.499.395	25,48	7.396.945.460	9,27	1.838.568.991	36,38	24,86	9,27	1.838.568.991	23,12	12,73	BPBD
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna		92,5		44,69		-	-	-		-	-	-		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Dok		3.854.515.942	115	3.149.876.420	44	144.626.870		4,59	44,00	144.626.870		3,75	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Fasilitas DESTANA & SMAB	Dok	60	2.161.122.110	90	622.252.800	36	61.870.600	40,00	9,94	36,00	61.870.600	60,00	2,86	
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen Jitupasna yang disusun	Dok	10	860.276.586	10	247.699.800	3	18.032.170	30,00	7,28	3,00	18.032.170	30,00	2,10	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon Penanggulangan Bencana yang disusun	Dok	15	833.117.247	15	239.879.800	3	64.724.100	30,00	26,98	3,00	64.724.100	20,00	7,77	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					10.434.516.346		4.202.017.400	5	1.693.942.121		40,31	5,00	1.693.942.121		16,23	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kejadian Bencana yang Tertangani	Kejadian	3	258.841.006	3	1.096.428.200	-	1.086.495.406	-	99,09	-	1.086.495.406	-	19,00	
	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Tertolong dan Terevakuasi	Orang	3000	4.073.942.912	1000	2.285.612.100	1.000	529.996.502	100,00	23,19	1.000	529.996.502	33,33	13,01	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Logistik yang Tersedia dan Didistribusikan	Jenis	25	6.101.732.428	25	819.977.100	-	77.450.213	-	9,45	-	77.450.213	-	1,27	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					156.467.107		45.051.640	-	-	-	-	-	-	-		
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	156.467.107	1	45.051.640	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993	100	1.888.528.100	-	601.747.000	30,00	31,86	-	601.747.000	-	7,98	Dinsos
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah korban bencana alam sosial urusan provinsi yang tertangani	Jiwa	73775	7.543.347.993	23550	1.888.528.100	-	601.747.000	-	31,86	-	601.747.000	-	7,98	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jiwa	47500	1.923.788.498	15000	234.950.000	-	192.445.000	-	81,91	-	192.445.000	-	10,00	
	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang diberikan sandang	KK	11875	1.076.137.499	3750	349.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah korban bencana alam	Jiwa	9000	878.794.233	3000	284.700.000	-	274.252.000	-	96,33	-	274.252.000	-	31,21	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kjumlah kelompok rentan yang tertangani	Jiwa	2700	1.985.390.740	900	643.878.100	-	20.000.000	-	3,11	-	20.000.000	-	1,01	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang dtingkatkan	Jiwa	2700	1.679.237.022	900	376.000.000	-	115.050.000	-	30,60	-	115.050.000	-	6,85	
					21.988.847.388		9.285.473.560		2.440.315.991	16,65	28,96		2.440.315.991	10,40	7,99	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tujuan : Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point	81,17	1.274.844.558.066	78,56										
Sasaran : Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	86,6	926.272.832.623	83,95										
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Mantap	%	86,60	926.272.832.623	83,95	266.399.796.782	51	84.403.249.530	60,75	31,68	51,00	84.403.249.530	58,89	9,11	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km	540,56	926.272.832.623	540,56	266.399.796.782	71	84.403.249.530	13,12	31,68	70,91	84.403.249.530	13,12	9,11	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan Lokasi km unit	6 ; 36 ; 60 ; 18	2.989.103.200	72 ; 20 ; 8	812.102.300	0 ; 0 ; 0	196.366.800	30,00	24,18	0 ; 0 ; 0	196.366.800		6,57	
	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km	150,00	-	0,00	812.102.300	-	196.366.800		24,18	-	196.366.800	-		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit	4453,29 ; 2352	4.144.694.400	1484,43 ; 784	1.139.986.200	296 ; 156	200.250.500	19,94	17,57	296 ; 156	200.250.500		4,83	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km	540,56	889.195.386.048	540,56	193.017.925.900	17	68.520.434.244	3,13	35,50	16,91	68.520.434.244	3,13	7,71	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	100,00	55.311.750.600	0,00	43.237.709.000	-	8.845.035.986	-	20,46	-	8.845.035.986	-	16,0	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	100,00	1484,43 ; 784		11.099.232.000	-	2.760.387.400	0	24,87	-	2.760.387.400	-		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjangjalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km	238,00	20.522.315.395.000	79,33	5.494.662.182	50	3.860.838.600	63,03	70,27	50,00	3.860.838.600	21,01	18,81	
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	210,00	1.345.223.810	70,00	11.529.018.000	3	2.436.000	4,29	0,02	3,00	2.436.000	1,43	0,18	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m	135,00	2.257.125.000		-	-	-			-	-	-	-	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan jalan/dan jembatan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok	6,00	287.809.710	2,00	69.161.200	1	17.500.000	50,00	25,30	1,00	17.500.000	16,67	6,08	
					926.272.832.623		266.399.796.782		84.403.249.530	24,42	27,79		84.403.249.530	12,20	9,04	
Sasaran : Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,5	333.511.569.922	50,04										
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76,28	Rp 333.511.569.922	74,55	186.136.763.239	66	42.748.262.039	88,53	22,97	66	42.748.262.039	86,52	12,82	Dinas PUPR
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit	70,00	142.147.696.325	30,00	87.795.607.194	19	30.768.634.539	63,33	35,05	19,00	30.768.634.539	27,14	21,65	
		Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun	Dok	15,00	500.194.000	0,00	-	-	-			-	-	-	-	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok	6,00	216.097.075	2,00	80.010.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku						4.851.992.994	-	-		-	-	-			
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah	40,00	15.132.196.000	20,00	10.909.623.200	-	2.822.108.000	-	25,87	-	2.822.108.000	-	18,65	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set	9,00	1.165.526.000	3,00	419.004.700	2	160.000.000	66,67	38,19	2,00	160.000.000	22,22	13,73	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	500,00	2.524.106.000	300,00	1.413.868.000	20	57.815.189	6,67	4,09	20,00	57.815.189	4,00	2,29	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi	40,00	9.056.874.000	20,00	6.931.207.000	-	2.182.768.000	-	31,49	-	2.182.768.000	-	24,10	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara	Buah	600,00	107.082.895.000	200,00	61.581.730.800	86	24.868.468.300	43,00	40,38			14,33	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi	282,00	6.469.808.250	97,00	1.608.170.500	-	677.475.050	-	42,13			-	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha	65,00	191.363.873.597	25,00	98.341.156.045	14	11.979.627.500	56,00	12,18	14,00	11.979.627.500	21,54	6,26	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok	15	1.547.276.000	5,00	748.989.100	-	110.000.000	-	14,69	-	110.000.000	-	7,11	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI	11	73.522.854.747	7,00	44.893.614.300	-	10.157.500	-	0,02	-	10.157.500	-	0,01	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI	3	36.926.346.400	1,00	40.600.327.045	-	2.610.681.000	-	6,43	-	2.610.681.000	-	7,07	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha	4.700	37.751.669.850	1000,00	10.214.079.000	45	8.956.779.000	4,47	87,69	44,69	8.956.779.000	0,95	23,73	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI	30	1.554.381.000	10,00	1.066.881.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha	4.700	38.074.754.700	0,00	290.830.000	-	290.830.000		100,00	-	290.830.000	-	0,76	
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI	19	1.986.590.900	19,00	526.435.200	-	1.180.000	-	0,22	-	1.180.000	-	0,06	
					333.511.569.922		186.136.763.239		42.748.262.039	20,54	25,63		42.748.262.039	3,40	12,82	
Sasaran : Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14	15.060.155.521	81,71										
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81,63	13.330.628.899	50,83	3.151.527.800	5,50	447.794.807	10,83	14,21	5,50	447.794.807,00		3,36	Dishub
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		94,37		-	-	-		-	-	-		
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		30		-	-	-		-	-	-		
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		46,2		-	-	-		-	-			
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	3	1.147.935.839	1	545.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	2	1.147.935.839	2	545.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	1		0		-	-			-	-	-		
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	Dokumen	18	2.789.208.621	4	788.353.000,00	3	230.307.726	75,00	29,21	3,00	230.307.726	16,67	8,26	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	2	221.081.845	0	21.600.000,00	-	3.175.226		14,70	-	3.175.226	-	1,44	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun	Paket	1				-	-			-	-	-		
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	12	1.975.505.979	3	565.923.000,00	3	227.132.500	100,00	40,13	3,00	227.132.500	25,00	11,50	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Dokumen	3	592.620.797	1	200.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pelanggaran Angkutan	Dokumen	60	2.364.773.429	20	598.801.000,00	-	139.838.800	-	23,35	-	139.838.800	-	5,91	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRLL dan DRK	Dokumen	56	1.461.831.014	18	394.061.800,00	1	97.533.800	5,56	24,75	1,00	97.533.800	1,79	6,67	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen	4	902.942.415	2	204.739.200,00	-	42.305.000	-	20,66	-	42.305.000	-	4,69	
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	unit	90	798.455.746	66	218.633.900	-	42.510.000	-	19,44	-	42.510.000	-	5,32	
		Jumlah UPUBKB yang terbina	unit	9		9		-	-	-		-	-	-		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina	Unit	9	327.234.693	9	94.499.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	Unit Kendaraan	90	471.221.053	66	124.134.000	-	42.510.000	-	34,25	-	42.510.000	-	9,02	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek	8	4.982.815.262	2	719.464.000,00	2	19.667.281	100,00	2,73	2,00	19.667.281	25,00	0,39	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8	4.140.876.440	2	575.700.000,00	2	-	100,00	-	2,00	-	25,00	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota	27	841.938.822	5	143.764.000,00	5	19.667.281	100,00	13,68	5,00	19.667.281	18,52	2,34	
Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di Provinsi NTB	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542	936.879.977	498	203.627.900,00	293	12.620.000	58,84	6,20	293,00	12.620.000	54,06	1,35	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542	635.480.051	350	134.963.000,00	293	11.707.500	83,71	8,67	293,00	11.707.500	54,06	1,84	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen	2	301.399.926	1	68.664.900,00	-	912.500	-	1,33	-	912.500	-	0,30	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881	310.560.026	811	77.825.000,00	78	2.851.000	9,62	3,66	78,00	2.851.000	8,85	0,92	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881	310.560.026	156	77.825.000,00	78	2.851.000	50,00	3,66	78,00	2.851.000	8,85	0,92	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi izin penyelenggaraan angkutan taksi	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	1.729.526.622	59,39	315.459.500,00	10,14	47.269.000	17,08	14,98	10,14	47.269.000	15,35	2,73	Dishub
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40	205.663.519	35	36.761.000,00	12	-	34,29	-	12,00	-	30,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40	205.663.519	35	36.761.000,00	12	-	34,29	-	12,00	-	30,00	-	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25	369.735.040	21	18.061.000,00	3	1.000.000	14,29	5,54	3,00	1.000.000	12,00	0,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25	369.735.040	21	18.061.000,00	3	1.000.000	14,29	5,54	3,00	1.000.000	12,00	0,27	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	596.584.926	22	135.408.000,00	-	39.190.000	-	28,94	-	39.190.000	-	6,57	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	596.584.926	22	135.408.000,00	-	39.190.000	-	28,94	-	39.190.000	-	6,57	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122	108.483.878	110	20.850.500,00	56	-	50,91	-	56,00	-	45,90	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122	108.483.878	110	20.850.500,00	56	-	50,91	-	56,00	-	45,90	-	
Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional		Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional		Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan	4	449.059.258	1	104.379.000,00	-	7.079.000	-	6,78	-	7.079.000	-	1,58	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Dokumen DED dan Amdal Pelabuhan Regional yang direncanakan	Dokumen	1		0		-	-			-	-	-		
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah pelabuhan yg diperihara	Paket	3		0		-	-			-	-	-		
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3	449.059.258	1	104.379.000,00	-	7.079.000	-	6,78	-	7.079.000	-	1,58	
					15.060.155.521		3.466.987.300		495.063.807	25,99	11,19		495.063.807	9,33	2,62	
Misi NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi																
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		B										
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.280.262.468.462	100	761.572.594.436	50	247.422.240.542	50,00	32,49	50	247.422.240.542	50,00	10,85	BPKAD

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100		-	-	-		-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen	3	7.120.144.147	1	1.951.730.000	1	537.401.400	100,00	27,53	1,00	537.401.400	33,33	7,55	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	3	285.775.970	1	39.366.000	1	-	100,00	-	1,00	-	33,33	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	3	299.041.511	1	93.430.600	1	-	100,00	-	1,00	-	33,33	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	408	308.159.930	136	96.279.500	30	-	22,06	-	30,00	-	7,35	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	408	335.178.476	136	104.721.000	30	-	22,06	-	30,00	-	7,35	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	804	179.076.204	268	50.895.800	125	14.050.000	46,55	27,61	124,76	14.050.000	15,52	7,85	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	408	102.312.957	136	31.966.000	50	-	36,76	-	50,00	-	12,25	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6	3.047.082.447	2	989.242.500	2	322.752.000	100,00	32,63	2,00	322.752.000	33,33	10,59	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	6	955.711.392	2	298.596.300	2	76.554.300	100,00	25,64	2,00	76.554.300	33,33	8,01	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun		3	286.531.331	1	89.522.000	1	14.419.000	100,00	16,11	1,00	14.419.000	33,33	5,03	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Rapat Terselenggara		5	106.101.823	2	40.713.000	2	21.232.500	100,00	52,15	2,00	21.232.500	40,00	20,01	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Terselenggara		6	249.769.729	2	84.453.500	2	37.970.500	100,00	44,96	2,00	37.970.500	33,33	15,20	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Rapat Terselenggara		6	88.877.876	2	39.228.100	2	20.663.100	100,00	52,67	2,00	20.663.100	33,33	23,25	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	kegiatan	10	876.524.501	2	248.415.700	1	29.760.000	50,00	11,98	1,00	29.760.000	10,00	3,40	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota			3.360.714.656	31	1.050.000.000	18	228.272.500	56,53	21,74	17,52	228.272.500		6,79	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota			358.536.403	10	103.818.800	5	53.108.000	50,00	51,15	5,00	53.108.000		14,81	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab./Kota			611.520.760	10	191.059.600	-	-	-	-	-	-		-	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota			617.880.512	10	193.046.600	3	5.560.000	30,00	2,88	3,00	5.560.000		0,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten/ Kota yang Terbina			189.379.472	10	59.168.500	7	-	70,00	-	7,00	-		-	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang Terlaksana			596.752.499	1	186.445.500	-	4.006.500	-	2,15	-	4.006.500		0,67	
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota			100.735.982	10	31.473.300	-	-	-	-	-	-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi			885.909.029	11	276.787.700	8	108.789.500	72,73	39,30	8,00	108.789.500		12,28	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang diterbitkan	100	#####	3.079.907.343	100	1.071.486.100	9	455.345.100	9,00	42,50	9,00	455.345.100	0,00	14,78	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang di terbitkan	25.000	#####		13.000	773.879.800	73	368.712.400	0,56	47,64			0,00		
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang sesuai dengan Ketentuan (Jumlah SPM, SPJ, SKPP, yang Teregistrasi)	1	1.841.684,00	834.573.471	1	556.200	1	-	100,00	-	1,00	-	0,00	-	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Seluruh OPD diterbitkan	9.000	6.620.000,00	412.901.470	3.000	27.579.500	2.003	10.544.600	66,77	38,23	2.003	10.544.600	0,03	2,55	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang Tersusun	408	12.171.863,00	75.527.929	136	187.371.700	63	37.942.000	46,32	20,25	63,00	37.942.000	0,00	50,24	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah SP2D yang di Terbitkan	33	1.128.710,00	220.807.961	11	12.000.000	5	-	45,45	-	5,00	-	0,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan OTH Perhitungan Pihak Ketiga yang disusun	20	4.965.000,00	1.860.720.491	10	41.798.000	5	35.267.200	50,00	84,38	5,00	35.267.200	0,00	1,90	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			274.643.874			135	-			135,00	-		-	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Optimalisasi Kas	396	88.273.171,29	319.860.667	132	15.193.600	6	-	4,55	-	6,00	-	0,00	-	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang direkon	6	#####	118.120.895	3	4.387.300	3	-	100,00	-	3,00	-	0,00	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	9	69.736.429,45	435.169.650	3	774.000	3	-	100,00	-	3,00	-	0,00	-	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan penatausahaan pemerintah kabupaten/ okta yang dilaksanakan	3	48.629.861,14	443.156.342	1	7.946.000	1	-	100,00	-	1,00	-	0,00	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Tersusunnya LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu			921.154.543	Dokumen	739.973.800	3	217.584.200		29,40	2,71	217.584.200		23,62	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas			187.705.510	2	105.806.300	1	14.323.400	50,00	13,54	1,00	14.323.400		7,63	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi			191.228.606	1	138.442.200	1	15.267.200	100,00	11,03	1,00	15.267.200		7,98	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan , Semesteran			137.404.786	17	61.661.100	7	16.765.200	41,18	27,19	7,00	16.765.200		12,20	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan			283.743.218	136	233.219.500	105	159.963.400	77,05	68,59	104,79	159.963.400		56,38	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tetang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			1.554.757.327.482	2	197.761.700	-	-	-	-	-	-		-	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			811.254.923	1	23.218.700	1	5.265.000	100,00	22,68	1,00	5.265.000		0,65	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			22.044.021.647	1	37.215.400	-	-	-	-	-	-		-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen terkait Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelapotan Keuangan Pemerintah Daerah			1.531.788.709.711	1	23.986.400	-	-	-	-	-	-		-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang terbina			600.248.720	20	34.418.300	-	-	-	-	-	-		-	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan daeri BLUD Provinsi			156.593.808	20	30.146.000	20	6.000.000	100,00	19,90	20,00	6.000.000		3,83	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					708.866.194.006		708.615.411.924	34	-		-	34,12	-		-	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Kegiatan Penyaluran bantuan keuangan				2	1.358.087.500	-	-	-	-					
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1.546.688.030	1	11.215.969.720	1	-	100,0	-	1,00	-		-	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase Jumlah Dana yang di Transfer			15.127.236.754	12	696.041.354.704	12	-	100,00	-	12,00	-		-	
	Pengeluaran Pembiayaan				696.113.746.093			-	-			-	-		-	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					323.277.201		242.116.100	3	66.593.000		27,50	3,46	66.593.000		20,60	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah			294.643.456	3	57.458.500	1	2.412.600	33,33	4,20	1,00	2.412.600		0,82	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Keuangan yang dipelihara			166.907.177	1	113.956.600	1	16.920.400	100,00	14,85	1,00	16.920.400		10,14	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan di Pemerintah Daerah			1.144.776.189	136	70.701.000	2	47.260.000	1,47	66,84	2,00	47.260.000		4,13	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	1.894.833.435	100	1.758.897.400	36	778.623.164	35,66	44,27	35,7	778.623.164	47,54	41,09	BPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan BMD Perangkat yang diterima	laporan	118	1.884.300.977	100	1.758.897.400	-	778.623.164	-	44,27	-	778.623.164	-	41,32	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen	3	144.326.463	1	85.445.000	-	3.895.000	-	4,56	-	3.895.000	-	2,70	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	849.473.398	2	24.190.000	-	4.440.000	-	18,35	-	4.440.000	-	0,52	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	322.846.116	1	60.344.000	-	16.015.000	-	26,54	-	16.015.000	-	4,96	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pergub	9	187.054.410	3	7.161.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Dokumen	90	521.468.814	16	449.485.000	-	177.070.000	-	39,39	-	177.070.000	-	33,96	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	kegiatan	36	3.964.798.034	12	15.491.000	5	-	42,86	-	5,14	-	14,29	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah		15	1.192.229.208	5	554.651.000	1	336.719.197	20,00	60,71	1,00	336.719.197	6,67	28,24	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	15	1.446.265.444	5	23.239.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan	3	51.859.019	1	38.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD, Jumlah SK Penghapusan BMD		102	395.654.567	34	323.956.400	6	137.482.967	17,65	42,44	6,00	137.482.967	5,88	34,75	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	396	136.353.046	1	115.148.000	1	76.001.000	100,00	66,00	1,00	76.001.000	0,25	55,74	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen	144	75.768.327	14	56.515.000	-	27.000.000	-	47,77	-	27.000.000	-	35,63	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen	30	22.623.608	5	5.137.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	11.336.285.806	80	3.521.330.000	2	1.139.052.567	2,19	32,35	1,75	1.139.052.567	1,94	10,05	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		40		30	-	75,00		30,00	-	61,36		INSPEKTORAT
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jlh Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dokumen	189	7.650.971.167	68	2.642.800.000	4	902.952.777	20,72	34,17	3,50	902.952.777	1,85	11,80	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok. LHA, LHE dan Monev	Dokumen	72	3.489.936.821	36	1.083.000.000	-	391.494.892	-	36,15	-	391.494.892	-	11,22	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	Dokumen	51	1.450.949.874	12	338.500.000	3	-	25,00	-	3,00	-	5,88	-	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHA	Dokumen	3	514.341.109	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Laporan Monev	Dokumen	57	2.195.743.363	19	310.800.000	11	210.540.000	57,89	67,74	11,00	210.540.000	19,30	9,59	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	75	3.685.314.639	25	878.530.000	-	236.099.790	-	26,87	-	236.099.790	-	6,41	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monev TPTGR	Dokumen	12	2.237.154.660	4	558.530.000	-	202.310.000	-	36,22	-	202.310.000	-	9,04	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHA	Dokumen	63	1.448.159.979	21	320.000.000	-	33.789.790	-	10,56	-	33.789.790	-	2,33	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402.134.356	5,55	2.169.816.300	4,55	597.500.749	81,98	27,54	4,55	597.500.749	60,26	42,61	INSPEKTORAT
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jlh Dok Laporan dan Dok Regulasi	Laporan	57	1.372.846.178	13	264.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jlh Dok Regulasi Kebijakan Pengawasan	Dokumen	9	151.867.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jlh Dok Laporan Kegiatan	Dokumen	39	1.220.978.692	13	264.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	6.510.146.795	95	-	90	597.500.749	94,74	-	90	597.500.749	92,78	-	INSPEKTORAT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Dok. Lap. Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	33	5.137.300.617	13	1.905.566.300	-	597.500.749	-	31,36	-	597.500.749	-	11,63	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jlh Dok Lap Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Dokumen	33	5.137.300.617	13	1.372.016.300	-	450.953.750	-	32,87	-	450.953.750	-	8,78	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						275.000.000	-	146.546.999		53,29					
					2.301.405.868.853		769.022.638.136		250.534.917.771	41,54	21,24		250.534.917.771	12,33	9,24	
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65	-	35,41	-		-		-		-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000	35,2	2.169.816.300	33	597.500.749	94,54	27,54	33,3	597.500.749	86,57	35,83	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	4,05	488.825.248	4,05	424.920.800	(12)	84.180.000	(284,98)	19,81	(11,54)	84.180.000	(284,98)	17,22	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	umlah Dokumen Target Pendapatan Daerah	Dok	2	488.825.248	2	128.120.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen		1.178.903.064	63,79	296.800.000	68	84.180.000	105,87	28,36	67,54	84.180.000		7,14	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp		1.178.903.064	3.499	296.800.000	1.553	84.180.000	44,37	28,36	1.552,5	84.180.000		7,14	
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp			85,04	-	34	-	40,29						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.183.810.000	50,12	13.029.812.100	1	3.244.461.744	2,78	24,90	1,40	3.244.461.744	2,58	7,03	Bapenda
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	9,59	45.363.335.800	9,91	13.029.812.100	1	3.240.516.744	8,40	24,87	0,83	3.240.516.744	8,68	7,14	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	4976,408401	2.021.420.000	1487,7265	483.790.000	852	162.018.584	57,28	33,49	852,23	162.018.584	17,13	8,02	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi kesamsatan	Rek	6	6.115.352.900	2	1.639.981.300	0	319.082.300	7,82	19,46	0,16	319.082.300	2,61	5,22	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	Kali	450	3.937.812.600	150	1.147.347.500	41	102.891.000	27,64	8,97	41,45	102.891.000	9,21	2,61	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan	Paket	36	2.852.436.900	12	925.812.300	2	150.687.400	16,67	16,28	2,00	150.687.400	5,56	5,28	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah Potensial	Obyek	1062624,178	4.399.620.500	1644206	1.003.359.700	299.782	101.626.740	18,23	10,13	299.782	101.626.740	28,21	2,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	Obyek	1936000	754.189.800	1600000	251.396.600	317.703	32.850.000	19,86	13,07	317.703	32.850.000	16,41	4,36	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	153330	4.610.505.900	121924	1.352.505.300	46.413	347.702.810	38,07	25,71	46.413	347.702.810	30,27	7,54	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi	Orang	42800	1.847.985.300	13000	606.995.100	1.199	121.808.000	9,23	20,07	1.199,4	121.808.000	2,80	6,59	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dok	30	552.200.000	10	130.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penagihan Pajak Daerah	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	Obyek	268308,6125	6.059.983.800	255380	1.934.994.600	98.544	686.375.400	38,59	35,47	98.544	686.375.400	36,73	11,33	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	5	439.848.000	3	146.616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	Dok	18	10.494.862.100	6	2.981.734.700	2	1.113.824.510	41,15	37,35	2,47	1.113.824.510	13,72	10,61	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Data Potensi Retribusi daerah dan Pendapatan Lain-lain	Dok	5	1.277.118.000	1	424.479.000	-	101.650.000	-	23,95	-	101.650.000	-	7,96	
					47.851.540.000		15.199.628.400		3.841.962.493	28,54	26,22		#REF!	(1,36)	7,67	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		BB (73,01 - 76,00)										
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444.339.884	100	4.152.555.500	20	868.439.500	20,00	20,91	20	868.439.500	20,00	6,01	Bappeda
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen	100	52.277.424.045	14	1.472.302.000	3	496.956.500	21,43	33,75	3,00	496.956.500	3,00	0,95	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisis	dokumen	100	14.444.339.884	3	125.878.600	-	4.802.700	-	3,82	-	4.802.700	-	0,03	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen	laporan	42	7.687.144.995	2	81.000.000	1	15.229.200	50,00	18,80	1,00	15.229.200	2,38	0,20	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan	Laporan	9	511.401.684	2	91.214.100	-	23.645.100	-	25,92	-	23.645.100	-	4,62	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan	Laporan	6	2.953.215.980	2	163.779.600	-	139.435.600	-	85,14	-	139.435.600	-	4,72	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah laporan	Laporan	6	233.417.323	1	593.359.900	-	29.462.890	-	4,97	-	29.462.890	-	12,62	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan (Provinsi)	dokumen	6	511.773.233	4	417.069.800	-	19.215.000	-	4,61	-	19.215.000	-	3,75	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen	Dokumen	3	2.113.151.090	5	968.465.900	1	252.798.000	20,00	26,10	1,00	252.798.000	33,33	11,96	
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan	laporan	14	1.364.185.684	1	515.370.600	-	153.015.000	-	29,69	-	153.015.000	-	11,22	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan	laporan	14	3.139.446.122	3	203.045.500	1	53.957.000	33,33	26,57	1,00	53.957.000	7,14	1,72	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	12	848.520.274	3	5.187.292.700	1	1.625.397.747	33,33	31,33	1,00	1.625.397.747	8,33	23,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	708.087.921	5	302.281.900	1	70.647.100	20,00	23,37	1,00	70.647.100	16,67	9,98	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	19.507.304.818	4	166.800.000	-	15.658.000	-	9,39	-	15.658.000	-	0,08	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil movev	dokumen	12	1.316.145.426	4	954.038.490	1	-	25,00	-	1,00	-	8,33	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	714.365.009	3	781.435.400	1	204.603.399	33,33	26,18	1,00	204.603.399	8,33	28,64	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	12	1.122.864.514	2	480.646.100	-	173.838.675	-	36,17	-	173.838.675	-	15,48	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	3.261.740.437	2	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil movev	dokumen	6	1.493.870.050	2	1.000.000.000	-	273.950.300	-	27,40	-	273.950.300	-	18,34	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	426.478.831	2	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	6	3.411.830.649	3	3.658.767.000	1	1.192.553.030	33,33	32,59	1,00	1.192.553.030	16,67	34,95	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	7.760.009.902	2	2.699.724.200	1	994.192.944	50,00	36,83	1,00	994.192.944	16,67	12,81	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	11.251.032.427	2	56.280.300	-	371.900	-	0,66	-	371.900	-	0,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil movev	dokumen	6	5.358.514.924	2	38.245.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	663.708.718	1	14.152.400	-	3.870.000	-	27,35	-	3.870.000	-	0,58	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	880.827.024	2	426.655.800	-	102.929.886	-	24,12	-	102.929.886	-	11,69	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil asistensi	dokumen	3	725.531.258	4	139.273.900	-	22.892.400	-	16,44	-	22.892.400	-	3,16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil movev	dokumen	6	1.398.271.579	4	122.379.100	-	15.885.900	-	12,98	-	15.885.900	-	1,14	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	698.367.957	2	162.055.800	-	52.410.000	-	32,34	-	52.410.000	-	7,50	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.923.408.414	84,44	2.642.800.000	-	902.952.777	-	34,17	-	902.952.777	-	30,89	INSPEKTORAT
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dokumen	280	2.923.408.414	97	2.642.800.000	-	902.952.777	-	34,17	-	902.952.777	-	30,89	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jlh Dok Laporan Hasil Evaluasi	Dokumen	186	506.495.268	62	144.000.000	-	540.000	-	0,38	-	540.000	-	0,11	
	Reviu Laporan Kinerja	Jlh Dok Laporan Hasil Review	Dokumen	24	952.099.099	8	241.500.000	1	71.280.000	12,50	29,52	1,00	71.280.000	4,17	7,49	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jlh Dok Lap dan Hasil Evaluasi	Dokumen	70	1.464.814.047	27	425.000.000	-	150.607.885	-	35,44	-	150.607.885	-	10,28	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.065.293.547	17,77	2.169.816.300		597.500.749	-	27,54	-	597.500.749	-	28,93	INSPEKTORAT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	256	2.065.293.547	85	1.905.566.300	-	597.500.749	-	31,36	-	597.500.749	-	28,93	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jlh Dok Laporan Pembinaan Pendampingan dan Asistensi PD	dokumen	246	1.121.493.498	82	275.000.000	-	146.546.999	-	53,29	-	146.546.999	-	13,07	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jlh Dok Laporan Hasil Movev PMRPB	dokumen	4	277.495.002	1	92.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jlh Dok Laporan Kegiatan	dokumen	6	666.305.047	2	166.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Nilai Sakip PD	A	A	1.412.262.367	A	612.142.500		234.103.100		38,24	-	234.103.100	-	16,58	Biro Organisasi
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan dokumen analisis jabatan yang sesuai ketentuan	%	100	498.328.606	100%	297.689.800	0	107.400.400	23,44	36,08	0,23	107.400.400	0,23	21,55	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan, Jumlah dokumen UPTD/UPTB Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	Dokumen	6	215.079.792	6 dokumen	113.631.100	-	46.891.700		41,27	-	46.891.700	-	21,80	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perangkat daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Dokumen	22	103.733.324	22	83.841.300	-	41.998.000	-	50,09	-	41.998.000	-	40,49	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja yang tersusun, jumlah sosialisasi peraturan penataan anjab abk, jumlah dokumen data jabatan struktural lingkup provinsi, jumlah dokumen hasil validasi Anjab, ABK dan Evjab Kab/Kota	Dokumen	47	179.515.490	47	100.217.400	-	18.510.700	-	18,47	-	18.510.700		10,31	
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang baik	%	100	913.933.761	100	314.452.700	0	126.702.700	0,12	40,29	0,12	126.702.700	0,12	13,86	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten / Kota yang nilai PMPRB baik, Nilai PMPRB Provinsi	10 Kab/Kota, Nilai A (>80-90)	10	236.215.400	10 Kab/Kota, Nilai A (>80-90)	60.796.100		26.217.000	90,00	43,12	-	26.217.000		11,10	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah dan jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Dokumen	35	225.755.369	35	130.717.300	-	66.376.800	-	50,78	-	66.376.800	-	29,40	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	PD	35	98.332.852	35 PD	79.926.700	-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki SOP tata kelola Pemerintahan	PD	35	89.390.873	35	27.720.500	-	12.053.500	-	43,48	-	12.053.500	-	13,48	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan	20 Inovasi, 35 PD	20	264.239.267	20	95.218.800	-	22.055.400	-	23,16	-	22.055.400	-	8,35	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.045.504	100	1.504.484.000	100	801.834.456	100	53,30	100	801.834.456	100,00	8,45	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					2.778.249.879	1	386.389.800	-	182.320.700	-	47,19	-	182.320.700		6,56	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				794.553.356	10	101.895.800	-	78.069.800	-	76,62	-	78.069.800		9,83	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				720.804.546	2	73.835.800	-	6.670.000	-	9,03	-	6.670.000		0,93	
	Fasilitasi Penataan Wilayah				1.262.891.976	2	210.658.200	-	97.580.900	-	46,32	-	97.580.900		7,73	
Pelaksanaan Otonomi Daerah		jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dokumen	3	4.928.620.306	1	827.035.700	-	464.223.541	-	56,13	-	464.223.541		9,42	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan DPRD	dokumen	70	1.933.939.071	30	282.133.000	-	155.889.800	-	55,25	-	155.889.800		8,06	
		fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota	Kab/kota	7		7		-	-	-						
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				652.721.357	3	70.950.000	-	37.819.700	-	53,30	-	37.819.700		5,79	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2.341.959.878	2	473.952.700	-	270.514.041	-	57,08	-	270.514.041		11,55	
Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.778.175.320	1	291.058.500	-	155.290.215	-	53,35	-	155.290.215		8,73	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				763.762.649	10	85.563.500	5	58.078.400	50,00	67,88	5,00	58.078.400		7,60	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				473.361.562	5	88.006.400	5	56.741.400	100,00	64,47	5,00	56.741.400		11,99	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				541.051.109	15	117.488.600	4	40.470.415	26,67	34,45	4,00	40.470.415		7,48	
					68.163.433.877		20.995.721.100		6.741.228.859	37,46	33,08		6.741.228.859	11,65	11,88	
Sasaran : Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		0,68										
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21.515.000.000	16	1.570.525.200	-	512.126.765	86,12	32,61	-	512.126.765	-	2,38	BKD
		Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan	Nilai	80		80		-	-	-		-	-	-		
		Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi	Nilai	135		88		-	-	-		-	-	-		
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	136		132		-	-	-		-	-	-		
		Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19		16		-	-	-		-	-	-		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah informasi pegawai yang dikelola		4170	3.699.062.520	1390	937.474.400	1.482	112.508.848	106,63	12,00	1.482,2	112.508.848	35,54	3,04	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK		4500	15.282.886	1500	-	40.680	-	2.712		40.680	-	90,00	-	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK		1200	112.747.576	400	10.000.000	327	10.070.844	81,75	100,71	327,00	10.070.844	27,25	8,93	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi		1200	1.904.365.497	400	770.579.400	-	20.935.000	-	2,72	-	20.935.000	-	1,10	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK		30	136.493.030	10	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN		3	20.365.626	1	4.700.000	-	1.000.000	-	21,28	-	1.000.000	-	4,91	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT		735	264.809.478	245	46.113.000	123	20.946.770	50,20	45,42	123,00	20.946.770	16,73	7,91	
	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN		3	105.727.934	1	6.500.000	-	6.518.820	-	100,29	-	6.518.820	-	6,17	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI		0	-			-	-			-	-			
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN		3	18.849.036	1	2.610.000	3	2.615.000	300,00	100,19	3,00	2.615.000	100,00	13,87	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU		42429	777.966.944	14143	77.940.000	1.680	39.937.339	11,88	51,24	1.680	39.937.339	3,96	5,13	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi		41850	231.093.533	13950	8.332.000	10.044	-	72,00	-	10.044	-	24,00	-	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik		41850	111.360.980	13950	10.700.000	10.044	10.485.075	72,00	97,99	10.044	10.485.075	24,00	9,42	
Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK mutasi, kenaikan pangkat dan promosi		10680	3.492.141.693	3560	425.407.000	5.116	274.424.492	143,72	64,51	5.116,3	274.424.492	47,91	7,86	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT		690	365.757.991	230	26.410.000	266	18.847.525	115,65	71,37	266,00	18.847.525	38,55	5,15	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala		9000	1.037.953.669	3000	135.682.000	-	67.760.861	-	49,94	-	67.760.861	-	6,53	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural		1200	2.088.430.033	400	263.315.000	1.320	187.816.106	330,00	71,33	1.320	187.816.106	110,00	8,99	
Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Pegawai yang terpetakan Kompetensinya		1200	1.415.601.711	400	135.036.800	240	92.070.400	60,00	68,18	240,00	92.070.400	20,00	6,50	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling		90	157.725.279	30	14.550.300	-	9.190.000	-	63,16	-	9.190.000	-	5,83	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya		1200	166.131.516	400	26.294.500	240	26.366.400	60,00	100,27	240,00	26.366.400	20,00	15,87	
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi		300	16.465.825	100	660.000	120	655.000	120,00	99,24	120,00	655.000	40,00	3,98	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal		240	111.581.969	80	-	99	-	123,75		99,00	-	41,25	-	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		30	269.562.902	10	26.473.000	-	27.569.000	-	104,14	-	27.569.000	-	10,23	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN		0	-		14.840.000	-	9.845.000		66,34	-	9.845.000			
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta		900	144.465.956	300	14.840.000	-	9.845.000	-	66,34	-	9.845.000	-	6,81	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi		60	92.884.590	20	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional		3	47.781.226	1	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional		1320	200.189.778	440	27.780.000	1.530	2.005.000	347,73	7,22	1.530	2.005.000	115,91	1,00	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK		120	121.717.118	40	12.090.000	108	3.660.000	270,00	30,27	108,00	3.660.000	90,00	3,01	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional		6	87.095.552	2	9.500.000	-	9.930.000	-	104,53	-	9.930.000	-	11,40	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai		38679	1.356.602.059	12893	72.607.000	4.398	33.123.025	34,11	45,62	4.398	33.123.025	11,37	2,44	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluai Kinerja Aparatur		9	42.616.157	3	300.000	6	300.000	198,00	100,00	5,94	300.000	66,00	0,70	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik		38679	420.896.842	12893	42.335.000	4.314	15.090.000	33,46	35,64	4.314	15.090.000	11,15	3,59	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur		36	166.530.163	12	330.000	0	330.000	2,58	100,00	0,31	330.000	0,86	0,20	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan		72	97.070.376	24	13.688.000	-	12.057.625	-	88,09	-	12.057.625	-	12,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya		600	160.593.800	200	4.162.000	-	750.000	-	18,02	-	750.000	-	0,47	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur		3	72.076.986	1	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN		138	243.672.558	46	5.235.000	1	1.650.000	2,00	31,52	0,92	1.650.000	0,67	0,68	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin		90	51.161.053	30	5.057.000	31	1.445.400	102,00	28,58	30,60	1.445.400	34,00	2,83	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS		60	14.160.609	20	750.000	14	750.000	68,85	100,00	13,77	750.000	22,95	5,30	
	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN		36	87.823.515	12	750.000	-	750.000	-	100,00	-	750.000	-	0,85	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.040	0,09	12.578.505.500	0	1.167.765.831	22,86	9,28	0,02	1.167.765.831	19,20	2,26	BPSDM
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,03		-	-	-		-	-	-		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,13		0	-	14,29		0,02	-	12,76		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,55		0	-	29,33		0,16	-	26,00		
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Tekhnis	org	630	3.017.260.627	210	539.128.400	30	82.872.050	14,29	15,37	30,00	82.872.050	4,76	2,75	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Tekhnis		9		3		1	-	33,33		1,00	-	11,11		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Diklat Teknis	dok	3	248.451.557	1	79.102.300	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Pembelajaran Diklat Teknis	Dok	3	188.076.443	1	59.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Pelayanan Dasar dan Pilihan	org	180	2.178.461.048	60	290.539.600	-	70.522.050	-	24,27	-	70.522.050	-	3,24	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Non Pelayanan Dasar	org	90		30		30	-	100,00		30,00	-	33,33		
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Penunjang	org	180		60		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	org	90		30		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	org	90		30		-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat Tekhnis	Dok	1	402.271.578	1	127.075.700	-	12.350.000	-	9,72	-	12.350.000	-	3,07	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	org	3.936	48.637.979.414	1.312	12.039.377.100	248	1.084.893.781	18,90	9,01	248,00	1.084.893.781	6,30	2,23	
		Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	org	480		150		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		12		4		2	-	50,00		2,00	-	16,67		
		Jumlah Dokumen Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Lembaga dan Kelembagaan		27		9		15	-	166,67		15,00	-	55,56		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				132.057.743		12.344.700	-	267.400	-	2,17	-	267.400			
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				392.098.238		59.786.700	-	21.746.300	-	36,37	-	21.746.300			
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				671.037.778		120.638.800	-	9.934.800	-	8,24	-	9.934.800			
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1.542.322.945		491.046.600	-	38.706.200	-	7,88	-	38.706.200			
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga				164.865.900		21.560.400	-	2.660.400	-	12,34	-	2.660.400			
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				188.076.443		18.059.400	-	-	-	-	-	-			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				45.427.613.780		11.277.764.500	-	1.011.578.681	-	8,97	-	1.011.578.681			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Peserta Rakor dalam rangka Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	orang	120	189.444.000	40	52.322.600	-	-	-	-	-	-		-	
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenanangan provinsi terkait pencatatan sipil	orang	270	40.610.000	90	11.216.400	-	-	-	-	-	-		-	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	2.357.507.000	100	680.122.600	0,10	25.380.000	0,10	3,73	0,10	25.380.000		1,08	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	kab/kota	10	496.033.000	10	137.000.000	1	25.380.000	10,00	18,53	1,00	25.380.000		5,12	
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah aparat dukcapil terbina Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	orang	400	1.861.474.000	160	543.122.600	-	-	-	-	-	-		-	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada Kawasan Lingkar Hutan dan Pesisir	%	25	223.448.000	15	47.500.000	-	2.907.000	-	6,12	-	2.907.000	-	1,30	DMPD Dukcapil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Kerjasama antar Desa yang di Fasilitasi	kali	3	223.448.000	1	47.500.000	-	2.907.000	-	6,12	-	2.907.000		1,30	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Kawasan Perdesaan	orang	121	150.068.000	40	47.500.000	-	2.907.000	-	6,12	-	2.907.000		1,94	
		Persentase desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang kuat	%	90	24.562.286.000	50	6.205.952.900	-	1.116.013.600	-	17,98	-	1.116.013.600		4,54	
		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam lembaga kemasyarakatan	%	80	24.562.286.000	60	6.205.952.900	-	1.116.013.600	-	17,98	-	1.116.013.600		4,54	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947.033.421	60	4.568.055.800	55	2.116.989.286	91,67	46,34	55,0	2.116.989.286	68,75	12,49	Diskominfotik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)	%	85	16.947.033.421	75	4.568.055.800	52	2.116.989.286	69,49	46,34	52,12	2.116.989.286	61,31	12,49	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokumen	5	912.845.710	1	175.165.000	-	92.926.278	52,12	53,05	-	92.926.278	-	10,18	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media Publik	Informasi	2117	4.013.523.491	610	1.499.884.000	436	862.731.000	71,48	57,52	436,00	862.731.000	20,60	21,50	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	Informasi	2070	290.091.285	300	64.939.400	200	20.445.500	66,67	31,48	200,00	20.445.500	9,66	7,05	
	Layanan Hubungan Manusia	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam Penyebarluasan Informasi	Lembaga	5	91.223.633	5	24.069.200	5	8.275.000	100,00	34,38	5,00	8.275.000	100,00	9,07	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	1440	277.404.895	30	76.022.700	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang Terselesaikan	Kasus	2	3.921.905.768	6	1.074.792.700	1	417.665.708	16,67	38,86	1,00	417.665.708	50,00	10,65	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	954	6.345.476.189	15	1.512.975.200	15	687.970.800	100,00	45,47	15,00	687.970.800	1,57	10,84	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Unit	30	1.094.562.451	10	140.207.600	1	26.975.000	10,00	19,24	1,00	26.975.000	3,33	2,46	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229.379.686	45	1.664.107.000	40	348.500.000	40	20,94	40,0	348.500.000	61,54	5,59	Diskominfotik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terintegrasi	6.229.379.686	Terstandarisasi	1.664.107.000	74	348.500.000	73,61	20,94	73,61	348.500.000		5,59	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-government	Dokumen	6	1.604.833.588	2	414.804.000	1	162.750.000	50,00	39,24	1,00	162.750.000	16,67	10,14	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	2.997.632.565	40	814.748.000	40	136.000.000	100,00	16,69	40,00	136.000.000	86,96	4,54	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	1.364.351.572	18	362.600.000	8	19.950.000	44,44	5,50	8,00	19.950.000	26,67	1,46	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	9	262.561.961	1	71.955.000	1	29.800.000	100,00	41,41	1,00	29.800.000	11,11	11,35	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809	20	408.000.000	15	169.194.500	75,00	41,47	15,00	169.194.500	50,00	11,05	Diskominfotik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	1.530.744.809	30	408.000.000	55	169.194.500	9,54	41,47	55,34	169.194.500	85,14	11,05	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Tersedia	Jenis	550	136.576.008	520	37.428.600	1.036	9.357.000	199,23	25,00	1.036,00	9.357.000	88,00	6,85	
	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	953.646.353	55	261.346.400	-	103.378.500	-	39,56	-	103.378.500	-	10,84	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun	Jenis	20	67.122.886	10	18.395.000	136	6.075.000	1.360	33,03	136,00	6.075.000	680,00	9,05	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD	46	79.657.114	46	21.830.000	14	7.024.000	30,43	32,18	14,00	7.024.000	30,43	8,82	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Rekomendasi Statistik	OPD	7	293.742.449	5	69.000.000	24	43.360.000	480,00	62,84	24,00	43.360.000	30,00	14,76	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492.430.577	30	349.650.000	27	127.700.987	90,00	36,52	27,0	127.700.987	54,00	8,56	Diskominfotik
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (%)	%	60	1.172.050.615	40	287.000.000	38	104.775.987	94,44	36,51	37,78	104.775.987	62,96	8,94	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	6	143.988.534	2	36.960.000	-	7.494.487	-	20,28	-	7.494.487	-	5,20	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	16	663.164.629	1	181.740.000	1	76.381.500	100,00	42,03	1,00	76.381.500	6,25	11,52	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Insiden	14	282.795.525	18	66.300.000	2	20.900.000	11,11	31,52	2,00	20.900.000	14,29	7,39	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	82.101.927	15	2.000.000	6	-	40,00	-	6,00	-	13,04	-	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan KomunikaIs Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	320.379.963	32	62.650.000	-	22.925.000	-	36,59	-	22.925.000	-	7,16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.192.636.948	85	150.429.928.842	92	36.730.099.172	108,2	24,42	92,0	36.730.099.172	108,24	7,49	Dinas Kesehatan
		Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		97		-	-	-		-	-	-		
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	80		65		51	-	78,80		51,22	-	64,03		
		Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100		100	-	100,00		100,00	-	100,00		
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		80		100	-	125,00		100,00	-	100,00		
		Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		94		60	-	63,83		60,00	-	60,00		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100		60	-	60,00		60,00	-	60,00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					389.682.139		119.018.839,00	60	12.500.000		10,50	60,00	12.500.000		3,21	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				389.682.139		119.018.839,00	60	12.500.000		10,50	60,00	12.500.000		3,21	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.634.345.730		501.964.400,00	-	49.198.000		9,80	-	49.198.000		3,01	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				266.672.510		81.904.400,00	60	36.698.000		44,81	60,00	36.698.000		13,76	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.367.673.220		420.060.000,00	-	12.500.000		2,98	-	12.500.000		0,91	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					182.411.964.543		56.025.056.800,00	100	18.612.405.642		33,22	100,00	18.612.405.642		10,20	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (orang)	Orang		774.614.349		237.911.000,00	-	35.400.000		14,88	-	35.400.000		4,57	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (orang)	Orang		655.641.495		201.370.300,00	-	37.150.000		18,45	-	37.150.000		5,67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas)	Puskesmas					10	38.730.000							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas)	Puskesmas		2.945.529.741		904.674.600,00	10	38.010.000		4,20	10,00	38.010.000		1,29	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET (Puskesmas)	Puskesmas		3.561.835.085		1.093.963.400,00	10	-		-	10,00	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kabupaten/kota)	Kab/Kota					10	65.610.000							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga (Kab/Kota)	Kab/Kota		1.836.434.213		564.032.800,00	6	37.950.000		6,73	6,00	37.950.000		2,07	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang diaktifkan (Posyandu)	Posyandu		1.930.300.173		592.862.300,00	6.706	42.950.000		7,24	6.706	42.950.000		2,23	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (Layanan)	Kab/Kota		2.734.984.709		840.008.900,00	10	132.378.600		15,76	10,00	132.378.600		4,84	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	Orang		140.003.686		43.000.000,00	4.546	-		-	4.546	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa (Puskesmas)	Puskesmas		725.817.529		222.923.800,00	157	38.840.000		17,42	157,00	38.840.000		5,35	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA (Puskesmas)	Puskesmas		432.172.821		132.735.300,00	49	-		-	49,00	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah (Kelompok)	Kelompok		10.500.276.470		3.225.000.000,00	-	700.000.000		21,71	-	700.000.000		6,67	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota		142.013.256.528		43.617.208.900,00	10	17.220.807.400		39,48	10,00	17.220.807.400		12,13	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan (Analisis)	Analisis		744.914.032		228.789.000,00	10	-		-	10,00	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota (Dokumen)	Dokumen		321.070.779		98.612.000,00	10	-		-	10,00	-		-	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan (Dokumen)	Dokumen		1.119.412.172		343.810.400,00	2	121.540.000		35,35	2,00	121.540.000		10,86	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dokumen)	Dokumen		192.098.081		59.000.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Investigasi)	investigasi		1.041.522.260		319.887.700,00	7	45.060.000		14,09	7,00	45.060.000		4,33	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah layanan Operasional rumah Sakit yang diberikan	Layanan		9.767.699.042		3.000.000.000,00	-	7.979.642		0,27	-	7.979.642		0,08	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai PSC (Kab/Kota)	Kab/Kota		295.152.515		90.651.600,00	5	37.500.000		41,37	5,00	37.500.000		12,71	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISROUTE (RS)	RS		281.032.330		86.314.800,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab Rujukan/nasional	Pengambilan		27.023.967		8.300.000,00	10	-		-	10,00	-		-	
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (orang)	Orang		371.172.564		114.000.000,00	-	12.500.000		10,96	-	12.500.000		3,37	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen		1.140.500.272		350.287.289,00	-	41.160.000		11,75	-	41.160.000		3,61	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen		1.031.427.633		316.787.289,00	-	50.700.000		16,00	-	50.700.000		4,92	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan (Paket)	Paket		109.072.639		33.500.000,00	1	33.500.000		100,00	1,00	33.500.000		30,71	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS		310.078.862		95.236.000,00	35	48.490.000		50,92	35,00	48.490.000		15,64	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS		310.078.862		95.236.000,00	35	48.490.000		50,92	35,00	48.490.000		15,64	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL (Kab/Kota)	Kab/Kota					-	-							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.042.202.633		929.166.080,00	-	20.085.400		2,16	-	20.085.400		0,66	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				2.745.067.922		838.413.580,00	-	20.085.400		2,40	-	20.085.400		0,73	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				297.134.711		90.752.500,00	-	-		-	-	-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					33.543.375		10.245.000,00	-	37.220.000		363,30	-	37.220.000		110,96	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				33.543.375		10.245.000,00	-	37.220.000		363,30	-	37.220.000		110,96	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					953.424.179		291.200.000,00	35	117.075.865		40,20	35,00	117.075.865		12,28	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				953.424.179		291.200.000,00	35	117.075.865		40,20	35,00	117.075.865		12,28	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651.104.864	2	733.565.500	2,41	87.386.200	120,5	11,91	2,41	87.386.200	80,33	2,39	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					488.903.921		103.767.000	-	18.326.200		17,66	-	18.326.200		3,75	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				120.743.018		25.627.000	-	3.302.000		12,88	-	3.302.000		2,73	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				368.160.903		78.140.000	-	15.024.200		19,23	-	15.024.200		4,08	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					2.916.233.419		629.798.500	11	69.060.000		10,97	10,97	69.060.000		2,37	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				2.625.342.018		568.058.500	827	44.060.000		7,76	827,00	44.060.000		1,68	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				290.891.402		61.740.000	-	25.000.000		40,49	-	25.000.000		8,59	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239.953.724	30	32.181.200	30	-	100	-	30,0	-	31,58	-	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					202.201.567		27.118.100,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				202.201.567		27.118.100,00	-	-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					37.752.156		5.063.100,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				37.752.156		5.063.100,00	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.139.610.602	83	73.816.199.676	-	6.374.195.456	-	8,64	-	6.374.195.456	-	3,91	RSUD
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.422	559.528.580.056	642	34.870.696.676	-	-	-	-	-	-			
	Sub Kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan	Jumlat alat kesehatan/kedokteran yang tersedia		1.422	559.528.580.056	642	31.370.696.676	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.809.896.151	73,81	12.108.602.882	-	722.458.984	-	5,97	-	722.458.984	-	2,42	RSJ Mutiara Sukma
		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80		-	-	-		-	-	-		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.522.964.303		6.802.840.674	38	571.660.274		8,40	38,14	571.660.274		2,24	
	Pengembangan Rumah Sakit				-		1.452.379.000	-	-		-	-	-			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				5.789.133.722		1.452.379.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.017.692.277		1.007.959.424	-	-		-	-	-		-	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				267.414.492		67.089.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				1.502.327.632		375.877.650	8	61.061.000		16,24	8,00	61.061.000		4,06	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				13.946.396.180		3.544.083.600	13	510.599.274		14,41	13,00	510.599.274		3,66	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.131.001.626		5.015.762.208	25	150.798.710		3,01	25,05	150.798.710		4,82	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				400.302.622		100.428.000	309	49.500.299		49,29	309,00	49.500.299		12,37	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				727.379.057		180.700.000	9.840	-		-	9.840	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				285.594.484		23.800.000	36	-		-	36,00	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1.666.133.906		418.000.000	48	101.298.411		24,23	48,00	101.298.411		6,08	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				51.591.557		12.943.300,00	-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.155.930.222		290.000.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.155.930.222		290.000.000,00	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	80	144.479.341.067	75	48.939.625.385	-	5.472.002.153	-	11,18	-	5.472.002.153	-	3,79	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.348.493.926		5.163.725.385	-	-		-	-	-		-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.348.493.926		5.163.725.385	-	-		-	-	-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					124.130.847.142		43.775.900.000	-	5.472.002.153		12,50	-	5.472.002.153		4,41	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				124.130.847.142		12.275.900.000	-	5.472.002.153		44,58	-	5.472.002.153		4,41	
					831.512.543.356		#REF!		49.386.141.965	50,42	34,89		49.386.141.965	43,16	6,85	
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%	30,49		31,49										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%	10,41	32.507.781.615	12,41	61.249.167.634	-	20.795.232.642	33,00	33,95	-	20.795.232.642	-	63,97	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					32.507.781.615		61.249.167.634	-	20.795.232.642		33,95	-	20.795.232.642		63,97	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				2.224.629.923		991.700.900	-	38.730.000		3,91	-	38.730.000		1,74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.283.151.692		8.891.032.834	-	65.610.000		0,74	-	65.610.000		0,22	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5.059.563.209	50	63.999.000	-	32.200.000	50,00	50,31	-	32.200.000	-	0,64	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					4.272.631.263			-	-			-	-		-	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				4.272.631.263			-	-			-	-		-	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					263.681.263		63.999.000	-	32.200.000		50,31	-	32.200.000		12,21	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				263.681.263		63.999.000	-	32.200.000		50,31	-	32.200.000		12,21	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					523.250.683			-	-			-	-		-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				523.250.683			-	-			-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	Point	63,10	37.567.344.824	62,39	61.313.166.634		20.827.432.642	41,50	31,93	-	20.827.432.642	-	14,09	
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan jangkauan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		13,68										
		Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		7,01										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214.496.782	99,15	468.598.026.510	-	1.613.145.230	0,40	0,34	-	1.613.145.230	-	0,11	Dikbud
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		93,40		-	-	-		-	-	-		
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		96,68		-	-	-		-	-	-		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		69,4		-	-	-		-	-	-		
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1,01		-	-	-		-	-	-		
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		1:18		-	-	-		-	-	-		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		1:14		-	-	-		-	-	-		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Angka Drop Out (DO) SMA			739.558.577.718		236.482.539.410	-	1.030.981.300		0,44	-	1.030.981.300			
		Persentase Akreditasi SMA minimal B						-	-			-	-			
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru			197.109.172.830			-	-			-	-			
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas			23.338.162.601		7.855.707.000	-	-		-	-	-			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dibangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dibangun			2.297.322.762		6.973.497.000	-	182.886.000		2,62	-	182.886.000			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah) yang dibangun						-	-			-	-			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang dibangun						-	-			-	-			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi			313.410.326		183.000.000	-	183.000.000		100,00	-	183.000.000			
	Rehabilitasi Asrama Sekolah				-		183.000.000	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan			1.251.368.765		3.739.606.800	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku Paket, Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa SMA :pemenuhan SPM) yang diadakan					6.900.800	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku Paket, Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa SMA :pemenuhan SPM) yang diadakan			3.185.496.284		1.007.557.000	-	-		-	-	-			
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						255.000	-	-		-	-	-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				156.631.512		489.348.600	-	354.833.900		72,51	-	354.833.900			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.148.695.856		117.424.000	-	716.100		0,61	-	716.100			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						398.211.410	-	101.617.700		25,52	-	101.617.700			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						32.203.500	-	-		-	-	-			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				510.521.915.134		162.892.500.000	-	-		-	-	-			
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				236.401.648		66.793.800	-	-		-	-	-			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					679.448.505.653		218.727.522.927	-	-		-	-	-			
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah				4.774.367.541		1.523.360.000	-	-		-	-	-			
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa				134.813.445.472		43.014.998.016	-	-		-	-	-			
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				7.245.360.370		2.311.781.001	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Mebel Sekolah				1.878.189.417		843.408.900	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						6.900.800	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				3.124.675.877		996.992.000	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				360.421.875		115.000.000	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				109.536.908.906		34.950.000.000	-	-		-	-	-			
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				156.631.512		698.000	-	-		-	-	-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				625.253.600		955.151.800	-	-		-	-	-			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				217.628.996		941.835.270	-	-		-	-	-			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				597.939.890		251.071.900	-	-		-	-	-			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				2.006.111.916		685.525.440	-	-		-	-	-			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				413.879.647.267		73.999.800	-	-		-	-	-			
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				231.923.014		66.793.800	-	17.824.800		26,69	-	17.824.800			
Pengelolaan Pendidikan Khusus					46.755.664.713		15.022.398.700	-	38.583.500		0,26	-	38.583.500			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				791.047.663		214.540.000	-	-		-	-	-			
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				20.007.974.171		6.383.955.000	-	-		-	-	-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus						95.376.100	-	31.661.800		33,20	-	31.661.800			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				313.410.326		111.153.100	-	2.996.700		2,70	-	2.996.700			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						78.930.500	-	1.200.000		1,52	-	1.200.000			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				156.705.163		58.944.100	-	-		-	-	-			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				25.448.918.464		8.120.000.000	-	-		-	-	-			
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				37.608.926		11.999.900	-	2.725.000		22,71	-	2.725.000			
		Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.986.884.736	100	567.849.300	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					1.654.483.076		472.849.300,00	-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus				448.292.624		128.121.500,00	-	-		-	-	-		-	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				1.206.190.452		344.727.800,00	-	-		-	-	-		-	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah							-	-							
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah							-	-							
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004.195	100	65.440.741.300	-	33.117.340.800	50,00	50,61	-	33.117.340.800	-	15,91	Dikbud
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		99,55		-	-			-	-	-		
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		70		-	-			-	-	-		
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		50		-	-			-	-	-		
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		5,5		-	-			-	-	-		
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi					208.215.004.195		65.440.741.300	-	33.117.340.800		50,61	-	33.117.340.800		15,91	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				204.926.015.690		64.831.101.300	-	32.995.470.700		50,89	-	32.995.470.700		16,10	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3.288.988.506		609.640.000	-	121.870.100		19,99	-	121.870.100		3,71	
PROGRAM PENGENDALUAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	194.889.101	100	52.045.000	-	9.260.000	17,00	17,79	-	9.260.000	-	4,75	Dikbud
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					146.783.381		41.080.000	-	9.260.000		22,54	-	9.260.000		6,31	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				105.871.069		30.898.000	-	9.260.000		29,97	-	9.260.000		8,75	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				40.912.312		10.182.000	-	-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					48.105.720		15.000.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				11.224.668		3.500.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				36.881.052		11.500.000,00	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187	35	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					831.855.187		200.000.000,00	-	-		-	-	-		-	
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi				831.855.187		200.000.000,00	-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332	100	1.530.922.250	30	489.472.727	30,00	31,97	30,0	489.472.727	30,00	4,33	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	480	11.196.717.332	0	1.530.922.250	-	489.472.727		31,97	-	489.472.727	-	4,37	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi (Orang)	Orang	45	534.060.283	0	12.000.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih (Orang)	Orang	300	479.287.279	0	2.130.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	Orang	1200	1.799.106.230	0	13.470.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan (Orang)	Orang	6	971.920.387	0	156.937.250	1	89.472.727		57,01	1,00	89.472.727	16,67	9,21	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga	60	7.175.198.742	20	1.345.705.000	1	400.000.000	5,00	29,72	1,00	400.000.000	1,67	5,57	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	Orang	180	237.144.411	0	680.000	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	31.488.202.013	100	21.923.347.550	-	8.011.869.100	35,00	36,54	-	8.011.869.100	-	25,44	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang MenjadiKewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar (%)	%	50	7.994.773.702	40	2.114.831.850	2	19.356.000	5,00	0,92	2,00	19.356.000	4,00	0,24	
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Dibangun (Orang)	Orang	6	7.994.773.702	0	2.114.831.850	1	19.356.000		0,92	1,00	19.356.000	16,67	0,24	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	45	4.997.845.464	0	30.122.200	-	-		-	-	-	-	-	
-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga	Event	15	341.995.244	2	30.122.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional (Orang)	Orang	450	4.655.850.220	0	-	-	-			-	-	-	-	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor	3	4.203.011.832	3	2.114.831.850	1	19.356.000	33,33	0,92	1,00	19.356.000	33,33	0,46	
-	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina (Orang)	Orang	36	4.203.011.832	12	2.114.831.850	10	19.356.000	83,33	0,92	10,00	19.356.000	27,78	0,46	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dibina	Lembaga	30	14.292.571.014	10	18.830.055.000	-	7.917.475.000	-	42,05	-	7.917.475.000	-	55,40	
-	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Difasilitasi (Lembaga)	Lembaga	30	14.292.571.014	10	18.830.055.000	2	7.917.475.000	20,00	42,05	2,00	7.917.475.000	6,67	55,40	
					1.740.228.049.346		558.312.931.910		43.241.087.857	27,91	26,02	1,45	43.241.087.857	4,14	6,29	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Misi NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan																
Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,25		67,72										
Sasaran :		Indeks Kualitas Air	Point	43,03		42,83										
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		87,53										
		Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66		87,6										
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24242424	1.024.902.303	51,515152	273.975.200	-	131.432.138	47,00	47,97	-	131.432.138	-	12,82	Dinas LHK
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	9	602.571.166	3	162.535.200	-	71.603.200	-	44,05	-	71.603.200	-	11,88	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersedia	Dokumen	1	445.639.676	1	113.694.200	-	49.112.200	-	43,20	-	49.112.200	-	11,02	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersedia	Dokumen	6	156.931.490	2	48.841.000	-	22.491.000	-	46,05	-	22.491.000	-	14,33	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	25	422.331.136	15	111.440.000	-	59.828.938	-	53,69	-	59.828.938	-	14,17	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	10	218.812.769	6	68.100.000	-	27.960.000	-	41,06	-	27.960.000	-	12,78	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	12	133.665.363	8	31.600.000	-	22.248.938	-	70,41	-	22.248.938	-	16,65	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69.853.004	1	11.740.000	-	9.620.000	-	81,94	-	9.620.000	-	13,77	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2.835.284.286	10	3.111.911.299	-	809.661.050	25,00	26,02	-	809.661.050	-	28,56	Dinas LHK
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	titik sampel	846	2.181.040.532	282	2.908.294.299	-	781.761.050	-	26,88	-	781.761.050	-	35,84	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	321.310.968	282	2.364.500.000	-	692.000.000	-	29,27	-	692.000.000	-	215,37	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	25	1.859.729.564	5	543.794.299	-	89.761.050	-	16,51	-	89.761.050	-	4,83	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	4	654.243.754	2	203.617.000	-	27.900.000	-	13,70	-	27.900.000	-	4,26	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemantauan kualitas air sungai, kualitas udara, dan air laut	kab/kota	10	654.243.754	10	203.617.000	-	27.900.000	-	13,70	-	27.900.000	-	4,26	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	232.926.464	1	23.583.400	-	7.157.400	30,00	30,35	-	7.157.400	-	3,07	Dinas LHK
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Persentase terbangunnya jumlah taman kehati	%	100	232,926,464	100	23.583.400	-	7.157.400	-	30,35	-	7.157.400	-		
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan pendukung Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan	kegiatan	3	232,926,464	1	23.583.400	-	7.157.400	-	30,35	-	7.157.400	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)		Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232.426.464	210	23.083.400	-	3.080.500	13,00	13,35	-	3.080.500	-	1,33	Dinas LHK
Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	unit usaha	14	232.426.464	14	23.083.400	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	unit usaha	14	232.426.464	14	23.083.400	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan	30	605.251.864	20	1.145.444.500	-	67.782.900	6,00	5,92	-	67.782.900	-	11,20	Dinas LHK
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	605.251.864	20	1.145.444.500	-	67.782.900	-	5,92	-	67.782.900	-	11,20	
	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	60	304.909.971	20	1.071.970.600	-	41.099.000	-	3,83	-	41.099.000	-	13,48	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	60	300.341.893	20	73.473.900	-	26.683.900	-	36,32	-	26.683.900	-	8,88	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	30	632.449.873	10	196.834.200	-	34.194.000	17,00	17,37	-	34.194.000	-		Dinas LHK
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kelompok peduli lingkungan yang dibina	kelompok	30	632.449.873	10	196.834.200	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	5,41	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	kelompok	30	632.449.873	10	196.834.200	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	5,41	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0		0	-	-	-	-	-	-	-			Dinas LHK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641.333.479	20	159.599.000	-	74.962.390	46,00	46,97	-	74.962.390	-	11,69	Dinas LHK
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	60	641.333.479	20	159.599.000	-	74.962.390	-	46,97	-	74.962.390	-	11,69	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	45	319.536.689	15	69.447.800	-	42.511.190	-	61,21	-	42.511.190	-	13,30	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	kasus	15	321.796.790	5	90.151.200	-	32.451.200	-	36,00	-	32.451.200	-	10,08	
					#VALUE!		4.934.430.999		1.128.270.378	26,29	30,65	-	1.128.270.378	-	18,21	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,7		67,7										
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.710.986.449	66,741273	16.654.472.306	-	2.132.568.121	12,00	12,80	-	2.132.568.121	-	3,46	Dinas LHK
		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10		-	-	-		-	-	-		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333.701.361	50	337.130.200	-	86.313.900	-	25,60	-	86.313.900	-	25,87	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333.701.361	50	337.130.200	-	86.313.900	-	25,60	-	86.313.900	-	25,87	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					693.158.700		212.670.400	-	69.390.300		32,63	-	69.390.300		10,01	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				693.158.700		212.670.400	-	69.390.300		32,63	-	69.390.300		10,01	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		tersedianya data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan	dokumen	3	846.111.385	1	1.036.465.800	-	74.943.500	-	7,23	-	74.943.500	-	8,86	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	Dokumen	3	548.256.118	1	41.915.000	-	21.130.500	-	50,41	-	21.130.500	-	3,85	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				121.668.600		13.186.200	-	13.760.000		104,35	-	13.760.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung				83.783.700		15.150.000	-	6.330.000		41,78	-	6.330.000			
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	159.370.240	1	17.500.000	-	18.400.000	-	105,14	-	18.400.000	-	11,55	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	138.485.027	1	25.000.000	-	7.540.000	-	30,16	-	7.540.000	-	5,44	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				2.771.143.800		923.714.600	-	7.783.000		0,84	-	7.783.000			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	16	1.224.773.148	16	9.309.942.000	-	193.295.688	-	2,08	-	193.295.688	-	15,78	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206.346.546	1	6.220.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kegiatan movev pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan	kegiatan	24	534.340.140	11	7.721.330.200	-	52.843.888	-	0,68	-	52.843.888	-	9,89	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				4.760.195.400		1.461.731.800	-	109.214.100		7,47	-	109.214.100			
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH	24	484.086.462	11	120.659.800	-	31.237.700	-	25,89	-	31.237.700	-	6,45	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	805	2.068.695.441	505000	5.168.595.706	-	1.489.653.382	-	28,82	-	1.489.653.382	-	72,01	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				4.157.716.200		1.305.905.400	-	484.358.500		37,09	-	484.358.500		11,65	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan				6.388.465.518		1.947.308.106	-	768.716.882		39,48	-	768.716.882		12,03	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	30	1.311.290.624	10	498.656.000	-	89.685.800	-	17,99	-	89.685.800	-	6,84	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	1	437.308.404	1	890.136.500	-	117.582.600	-	13,21	-	117.582.600	-	26,89	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	90	320.096.412	30	526.589.700	-	29.309.600	-	5,57	-	29.309.600	-	9,16	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Terlaksananya pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	4,575	321.310.968	1525	449.855.400	-	175.847.700	-	39,09	-	175.847.700	-	54,73	
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	movev kegiatan pengolahan HHBK yang dilaksanakan	kegiatan	3	321.310.968	1	275.803.500	-	174.521.000	-	63,28	-	174.521.000	-	54,32	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				534.155.700		174.051.900	-	1.326.700		0,76	-	1.326.700			
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun		Terlaksananya pengolahan HHK dengan kapasitas produksi < 6000	Industri	3	458.873.190	1	139.812.800	-	43.123.651	-	30,84	-	43.123.651	-	9,40	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	16	458.873.190	16	139.812.800	-	43.123.651	-	30,84	-	43.123.651	-	9,40	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30503,3	2.843.299.456	30503,3	621.370.710	-	221.833.600	35,00	35,70	-	221.833.600	-	7,80	Dinas LHK
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1.927.987.906	1	523.018.900	-	177.153.100	-	33,87	-	177.153.100	-	9,19	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3,155	585.814.157	3155	170.300.900	-	52.881.600	-	31,05	-	52.881.600	-	9,03	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	321.310.968	1	100.000.000	-	98.340.000	-	98,34	-	98.340.000	-	30,61	
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	122	128.524.387	122	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	1	715.617.362	1	157.718.000	-	17.152.500	-	10,88	-	17.152.500	-	2,40	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelompok	2	144.589.936	2	45.000.000	-	6.479.000	-	14,40	-	6.479.000	-	4,48	
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	4	32.131.097	4	10.000.000	-	2.300.000	-	23,00	-	2.300.000	-	7,16	
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	72	345.259.560	24	17.813.400	-	1.763.400	-	9,90	-	1.763.400	-	0,51	
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	72	345.259.560	24	17.813.400	-	1.763.400	-	9,90	-	1.763.400	-	0,51	
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok	8	570.051.990	8	80.538.410	-	42.917.100	-	53,29	-	42.917.100	-	7,53	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16	195.869.624	16	30.347.410	-	5.081.900	-	16,75	-	5.081.900	-	2,59	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lem baga	8	374.182.366	8	50.191.000	-	37.835.200	-	75,38	-	37.835.200	-	10,11	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125.242.316	13,27	2.047.432.700	-	152.336.578	7,00	7,44	-	152.336.578	-	7,17	Dinas LHK
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Penyuluh dan Penyuluh Kehutanan Swadaya	orang	90	659.021.648	30	2.047.432.700	-	152.336.578	-	7,44	-	152.336.578	-	23,12	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	5	137.521.094	1	25.800.000	-	9.980.000	-	38,68	-	9.980.000	-	7,26	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	KTH	17	197.927.556	6	15.740.000	-	11.780.000	-	74,84	-	11.780.000	-	5,95	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	Kelompok	3	323.572.997	1	2.005.892.700	-	130.576.578	-	6,51	-	130.576.578	-	40,35	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALURAN SUNGAI (DAS)		Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4	14.296.328.273	4	4.175.624.500	-	63.671.400	1,50	1,52	-	63.671.400	-	0,45	Dinas LHK
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah KTA yang terbangun	Unit	578	905.081.587	130	4.175.624.500	-	63.671.400	-	1,52	-	63.671.400	-	7,03	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	468	328.328.399	100	2.184.000	-	1.222.000	-	55,95	-	1.222.000	-	0,37	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	110	255.442.220	30	19.500.000	-	9.680.000	-	49,64	-	9.680.000	-	3,79	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah kegiatan money bangunan Konservasi Tanah dan Air	kegiatan	190	321.310.968	30	4.153.940.500	-	52.769.400	-	1,27	-	52.769.400	-	16,42	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900	89,07	680.998.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	dokumen	3,00	553.544	1,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTR provinsi NTB yang disetujui	Dok	3,00	100.000		-	-	-			-	-		-	
	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok	3,00	100.000		-	-	-			-	-		-	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Orang	1200,00	353.544	0,00	-	-	-			-	-		-	
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok	1,00	1.125.309	3,00	57.254	1	18.120	33,33	31,65	1,00	18.120		1,61	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok	0,00	50.000	0,00	-	-	-			-	-		-	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ranperda RTR Kabupaten/kota yang dievaluasi	Dok	1,00	778.059	3,00	57.254	1	18.120	33,33	31,65	1,00	18.120		2,33	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Penataan ruang	Orang	500,00	297.250	1500,00	-	-	-	-	-	-	-		-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan)	Dokumen	997395000	1.047.397.547		214.726.900,00	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				618.912.453		126.883.200,00	-	-		-	-	-		-	
	Sistem Informasi Penataan Ruang				428.485.094		87.843.700,00	-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Dok	3,00	997.395	1,00	171.298	5	31.918	461,00	18,63	4,61	31.918	153,67	3,20	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Dok	3,00	568.912	1,00	94.455	-	17.580	-	18,61	-	17.580	-	3,09	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kawasan yang tersedia informasi/database pemanfaatan ruangnya	Dok	3,00	428.483	1,00	76.844	-	14.338	-	18,66	-	14.338	-	3,35	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Dok	3,00	341.343	1,00	56.069	12	11.148	1.248	19,88	12,48	11.148	416,00	3,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran Penataan Ruang yang tertangani	Dok	3,00	219.805	1,00	56.069	-	11.148	-	19,88	-	11.148	-	5,07	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang	Kasus	3,00	121.538	0,00	-	-	-			-	-	-	-	
					83.993.447.393		#REF!		2.570.409.699	34,55	29,08	0,41	2.570.409.699	3,14	10,18	
Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100		70										
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70		50										
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30		20										
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	70	5.183.085.800	-	1.975.607.839	38,00	38,12	-	1.975.607.839	-	12,41	Dinas LHK
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					15.916.448.484		5.183.085.800	-	1.975.607.839		38,12	-	1.975.607.839		12,41	
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				10.380.853.500		3.609.384.500	-	1.512.245.800		41,90	-	1.512.245.800			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				200.691.900		107.797.300	-	42.620.000		39,54	-	42.620.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				3.148.514.551		1.321.565.800	-	395.602.039		29,93	-	395.602.039		12,56	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				352.014.600		117.338.200	-	-		-	-	-			
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				81.000.000		27.000.000	-	25.140.000		93,11	-	25.140.000		12,41	
					15.916.448.484		#REF!		1.975.607.839	38,00	40,10	0,05	1.975.607.839	12,19	9,67	
Misi NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi																
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%	75,5637493		73,797746										
Sasaran : Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17814		13362										
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	1.099.303.769	100	211.388.000	-	154.390.233	75,00	73,04	-	154.390.233	-	14,04	DPMPSTP
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		jumlah kebijakan		1	779.890.311	1	26.201.000	-	4.948.800	50,00	18,89	-	4.948.800	-	0,63	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah insentif/kebijakan yang diberikan kepada investor		1	367.899.845	1	5.255.000	-	1.979.400	-	37,67	-	1.979.400	-	0,54	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen movev	Dokumen	1	411.990.466	1	20.946.000	-	2.969.400	-	14,18	-	2.969.400	-	0,72	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		Jumlah Peta dan Dokumen RUPM		2	1.033.877.436	2	185.187.000	2	149.441.433	100,00	80,70	2,00	149.441.433	100,00	14,45	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	253.433.740	1	38.924.500	1	35.597.033	100,00	91,45	1,00	35.597.033	100,00	14,05	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi		1	780.443.696	1	146.262.500	1	113.844.400	100,00	77,84	1,00	113.844.400	100,00	14,59	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	2.628.846.723	100	51.609.700	-	7.979.700	15,00	15,46	-	7.979.700	-	0,30	DPMPTSP
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Promosi	Dokumen	2	2.528.846.721	2	51.609.700	-	7.979.700	-	15,46	-	7.979.700	-	0,32	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	1	1.270.021.300	1	45.060.000	-	6.430.000	-	14,27	-	6.430.000	-	0,51	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen	1	1.258.825.421	1	6.549.700	-	1.549.700	-	23,66	-	1.549.700	-	0,12	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1.953.548.364	87	166.024.600	15	92.569.300	17,24	55,76	15,00	92.569.300	16,13	4,74	DPMPTSP
Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota		4	300.577.354	4	34.805.600	2	22.938.700	50,00	65,91	2,00	22.938.700	50,00	7,63	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkupnya lintas kab/kota	Izin	4	300.577.354	4	34.805.600	15	22.938.700	375,00	65,91	15,00	22.938.700	375,00	7,63	
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	1.652.971.008	3	131.219.000	2	69.630.600	66,67	53,06	2,00	69.630.600	66,67	4,21	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi	Izin	3700	1.008.309.951	3500	15.014.900	1.695	5.998.500	48,43	39,95	1.695,0	5.998.500	45,81	0,59	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pemantuan pemenuhan komitmen	Izin	10	437.776.364	10	42.458.700	3	12.716.500	30,00	29,95	3,00	12.716.500	30,00	2,90	
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokumen	2	206.884.693	2	73.745.400	1	50.915.600	50,00	69,04	1,00	50.915.600	50,00	24,61	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2.702.918.671	50	598.712.600	25	183.474.300	50,00	30,64	25,00	183.474.300	41,67	6,79	DPMPTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	500	2.702.918.669	500	598.712.600	325	183.474.300	65,00	30,64	325,00	183.474.300	65,00	6,79	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau	Dokumen	4	430.339.312	4	75.656.000	4	33.180.000	100,00	43,86	4,00	33.180.000	100,00	7,71	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	5	1.355.125.280	5	343.043.400	3	68.255.700	60,00	19,90	3,00	68.255.700	60,00	5,04	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Dokumen	20	917.454.077	20	180.013.200	23	82.038.600	115,00	45,57	23,00	82.038.600	115,00	8,94	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428.183.869	100	116.450.000	63	300.000	63,00	0,26	63,0	300.000	63,00	0,07	DPMPTSP

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP	Dokumen	2	428.183.869	2	116.450.000	1	300.000	50,00	0,26	1,00	300.000		0,07	
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP secara OSS	Dokumen	2	428.183.869	2	116.450.000	1	300.000	50,00	0,26	1,00	300.000	50,00	0,07	
					8.812.801.396		#REF!		438.713.533	62,71	38,98		438.713.533	57,13	5,70	
Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		23,52			300.000	-			-	-		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.416.999.999	10	47.210.192.800	-	4.200.704.200	-	8,90	-	4.200.704.200	-	3,10	Disnakwan
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Jumlah distributor obat hewan yang diawasi (toko/depo)	toko/depo	20	185.183.219	10	21.702.388	-	-		-	-	-	-	-	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	(Sampel)	30	107.327.825	10	11.142.388	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	(Laporan)	3	77.855.394			-	-							
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlh bibit ternak yang diadakan (ekor)	ekor	1000	121.941.956.931			-	3.791.856.200							
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing/Unggas yang diadakan	(ekor)	3000	116.114.065.769	1	1.056.000.000	-	3.791.856.200	-	359,08	-	3.791.856.200	-	3,27	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Kelompok pakan	(kelompok)	61	5.827.891.162	1000	46.835.374.300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah lahan HPT yang dikelola	(Ha)	6	3.746.984.265	1000	46.670.648.700	-	210.373.000	-	0,45	-	210.373.000	-	5,61	
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan yang dihasilkan	(Laporan)	48	2.361.698.911	6	164.725.600	-	124.790.000	-	75,76	-	124.790.000	-	5,28	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan yang dihasilkan/ bp3tr	(Laporan)	3	1.385.285.354	6	1.065.396.500	-	3.190.000	-	0,30	-	3.190.000	-	0,23	
		Jumlah produksi Benih HMT / serading	(ton)			1	670.643.000	2	82.393.000	200,00	12,29	2,00	82.393.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provins		Peningkatan Populasi ternak			5.385.952.199	1 laporan / 5 ton	394.753.500	-	71.505.000		18,11	-	71.505.000		1,33	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pakan Ternak /	Ton	147	1.538.887.809		1.249.865.600	5	7.600.000		0,61	5,00	7.600.000		0,49	
		Semen beku yang diproduksi	(Dosis)	400000	3.287.391.781	365 Ton + 15 ton +2 ton / 100000 Dos is	1.067.038.350	14.989	63.905.000		5,99	14.989	63.905.000		1,94	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provnsi	(kali)	12	74.593.010	12	7.590.000	-	5.630.000	-	74,18	-	5.630.000	-	7,55	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil pternakan yang tersertifikasi (sertifikat)	(sertifikat)	5	764.336.933	5	248.368.200	-	72.720.000	-	29,28	-	72.720.000	-	9,51	
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV	(Sertifikat)	5	132.164.505	5	1.426.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat	(Sertifikat)	15	419.898.215	15	192.442.000	-	45.000.000	-	23,38	-	45.000.000	-	10,72	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	(penyakit)	5	212.274.213	5	54.500.000	10	27.720.000	200,00	50,86	10,00	27.720.000	200,00	13,06	
Kesejahteraan Hewan		Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH (Persen)		1	265.289.873	1	25.748.800	-	1.742.000	-	6,77	-	1.742.000	-	0,66	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV	(orang)	50	131.250.886	35	14.106.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH Diawasi		61	134.038.987	61	11.642.000	61	1.742.000	100,00	14,96	61,00	1.742.000	100,00	1,30	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	3	1.279.105.431	3	69.563.400	-	7.500.000	-	10,78	-	7.500.000	-	0,59	Disnakwan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	(paket)	10	260.536.230	10	57.410.600	-	7.500.000	-	13,06	-	7.500.000	-	2,88	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	(jenis)	10	260.536.230	10	57.410.600	-	7.500.000	-	13,06	-	7.500.000	-	2,88	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok berbasis korporasi		3	175.385.402	3	12.152.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	jumlah koorporasi terbentuk	(lembaga)			3	5.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dibina	(lembaga)	3	93.330.599	3	4.106.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi yang dievaluasi	(lembaga)	5	44.498.718	2	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319	1,93	20.209.054.200	-	2.213.634.700	-	10,95	-	2.213.634.700	-	3,45	Distanbun
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			14.385.072.389		4.586.290.000	-	121.030.700		2,64	-	121.030.700		0,84	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				14.385.072.389		4.586.290.000	-	121.030.700		2,64	-	121.030.700		0,84	
		Jumlah/jenis pupuk (bersubsidi) yang diawasi		5		5		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah sample pestisida yang diawasi di 10 kabupaten/kota		30				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75		176		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pasca panen dan pengolahan hasil yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		45		3		-	-	-		-	-	-		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman		100	49.571.809.080	100	15.622.764.200	-	2.092.604.000	-	13,39	-	2.092.604.000	-	4,22	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah kegiatan Penerbitan sertifikasi benih yang dilaksanakan		3	399.873.000	1	133.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				7.006.789.800		2.335.596.600	-	54.220.000		2,32	-	54.220.000		0,77	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Hortikultura		115				-	-			-	-	-		
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Hortikultura		2750				-	-			-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Hortikultura		35000				-	-			-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Hortikultura		83000				-	-			-	-	-		
		Luasan bantuan benih hortikultura		148		47,85		-	-			-	-	-		
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				6.620.607.880		1.261.266.800	-	-		-	-	-		-	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Pangan		1045				-	-			-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan		348				-	-			-	-	-		
		Luas bantuan benih tanaman pangan		2370		790		-	-	-		-	-	-		
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				11.892.609.800			-	2.038.384.000			-	2.038.384.000		17,14	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan (Kg)		273		86		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan (Batang)		444612		148204		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan		5793		1750		-	-	-		-	-	-		
		Luas Bantuan Benih Tanaman Perkebunan		1530		510		-	-	-		-	-	-		
		Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1530		510		-	-	-		-	-	-		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055	35,41	104.378.790.100	-	9.568.474.660	-	9,17	-	9.568.474.660	-	3,58	Distanbun
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-	2		-	-	-		-	-	-		
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Bantuan Prasarana Pertanian Yang dibangun		676	274.817.512.028	264	104.378.790.100	-	9.568.474.660	-	9,17	-	9.568.474.660	-	3,48	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun		507	154.611.096.505	207	55.153.625.000	-	4.616.460.000	-	8,37	-	4.616.460.000	-	2,99	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		163	35.937.090.995	55	12.435.949.100	-	2.036.400.000	-	16,38	-	2.036.400.000	-	5,67	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63.429.872.528	2	21.949.764.000	-	2.915.614.660	-	13,28	-	2.915.614.660	-	4,60	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD yang dibangun/direhabilitasi		8	20.839.452.000	4	14.839.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.136	95,5	360.656.500	-	26.558.000	-	7,36	-	26.558.000	-	2,16	Distanbun
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				5	1.229.042.136	5	360.656.500	-	26.558.000	-	7,36	-	26.558.000	-	2,16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bintek Model Peramalan OPT Tanaman Pangan			1.229.042.136		360.656.500	-	26.558.000		7,36	-	26.558.000		2,16	
		Luasan Pengendalian OPT (Tanaman Pangan)		13124				-	-			-	-	-		
		Luasan Pengendalian OPT (Hortikultura)		1083				-	-			-	-	-		
		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1360				-	-			-	-	-		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000	50	5.431.885.000	-	669.165.863	-	12,32	-	669.165.863	-	3,54	Distanbun
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Yang Dilatih		900	4.197.327.300	300	1.399.109.100	-	192.854.780	-	13,78	-	192.854.780	-	4,59	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		750	3.436.512.300	250	1.145.504.100	-	110.065.208		9,61	-	110.065.208	-	3,20	
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh Swadaya/Swasta yang ditingkatkan kapasitasnya		150	760.815.000	50	253.605.000	-	82.789.572		32,65	-	82.789.572	-	10,88	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		345	14.697.245.700	115	4.032.775.900	-	476.311.083	-	11,81	-	476.311.083	-	3,24	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				8.604.246.000		2.001.776.000	-	114.522.280		5,72	-	114.522.280		1,33	
		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		115		115		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah kegiatan Peda dan Penas yang dilaksanakan/diikuti		2	-	0		-	-			-	-	-		
		Jumlah kegiatan Rembuk KTNA yang difasilitasi		2	-	0		-	-			-	-	-		
		Jumlah Buku Program Penyuluhan Yang Dibuat		2	-	0		-	-			-	-	-		
		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan		2	-	0		-	-			-	-	-		
		Jumlah siswa SMKPP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607		607		-	-	-		-	-	-		
		Jumlah siswa SMKPP Pertanian Bima yang difasilitasi		360		360		-	361.788.803	-		-	361.788.803	-		
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		5	6.092.999.700	5	2.030.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	5.253.465.493	10	16.654.472.306	-	2.132.568.121	-	12,80	-	2.132.568.121	-	40,59	Dinas LHK
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333,701,361	50	337.130.200	-	86.313.900	-	25,60	-	86.313.900	-		
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333,701,361	50	337.130.200	-	86.313.900	-	25,60	-	86.313.900	-		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)							212.670.400	-	69.390.300		32,63	-	69.390.300			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			3	846,111,385	1	212.670.400	-	69.390.300	-	32,63	-	69.390.300	-		
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		tersedianya data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan	dokumen	3	548,256,118	1	1.036.465.800	-	74.943.500	-	7,23	-	74.943.500	-		
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	Dokumen				41.915.000	-	21.130.500		50,41	-	21.130.500			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi						13.186.200	-	13.760.000		104,35	-	13.760.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri		340271,86	600.000.000	244926,54	1.614.042.000	-	207.293.550	-	12,84	-	207.293.550	-	34,55	
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Mitigasi Bencana		75	60.156.999	25	2.774.689.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persetujuan teknis/rekomendasi pemafaatan ruang laut		17	60.156.999	10	16.483.100	-	14.118.000	-	85,65	-	14.118.000	-	23,47	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah SOP yang tersusun		1	3.338.340.368	1	1.988.042.000	-	207.293.550	-	10,43	-	207.293.550	-	6,21	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah lokasi yang disurvei, ekspos rencana usaha		17	3.338.340.368	10	16.483.100	-	14.118.000	-	85,65	-	14.118.000	-	0,42	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi		20	3.338.340.368	20	2.779.689.900	-	101.024.000	-	3,63	-	101.024.000	-	3,03	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256572	11.895.178.174	241843	5.728.505.000	42.323	82.325.375	17,50	1,44	42.323	82.325.375	16,50	0,69	Dislutkan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil		Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia		45	3.555.957.843	36	2.420.995.000	-	8.840.000	-	0,37	-	8.840.000	-	0,25	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Publikasi Data Statistik Perikanan Tangkap		1	60.000.000	1		-	-	-		-	-	-	-	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia		5	1.023.000.000	0		-	-	-		-	-	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap		45	2.095.957.843	36	2.420.995.000	-	8.840.000	-	0,37	-	8.840.000	-	0,42	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT		Jumlah kapal yang memperoleh rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		220	380.000.000	0		-	-			-	-	-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1	80.000.000			-	-			-	-	-	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan		220	250.000.000	0	-	-	-			-	-	-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap		1	50.000.000			-	-			-	-	-	-	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Jumlah kapal yang memperoleh rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		50	55.000.000	50	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang tersusun		1	25.000.000			-	-			-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang terfasilitasi		50	30.000.000	50		-	-	-		-	-	-	-	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar		500	265.000.000	500		-	-	-		-	-	-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT	Jumlah SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang disusun		1	25.000.000	1		-	-	-		-	-	-	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar		500	240.000.000	500		-	-	-		-	-	-	-	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM (Unit)		1	5.167.442.138	1	3.280.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan yang terbina		1	2.984.965.328		2.065.400.000	-	33.512.114.660		1.623	-	33.512.114.660	-	1.122,70	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	pelabuhan yang terbina operasionalnya		1	1.882.476.810		1.215.550.000	-	-		-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT		Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit		50	77.000.000	50	-	-	33.512.114.660	-		-	33.512.114.660	-	43.522,23	
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah penerbitan persetujuan		50	77.000.000		-	-	20.005.800.000			-	20.005.800.000	-	25.981,56	
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT		Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang terdaftar		220	119.724.941	200	99.510.400	-	3.305.000.000	-	3.321	-	3.305.000.000	-	2.760,49	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT	Jumlah SOP Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang tersusun		0	19.724.941			-	10.201.314.660			-	10.201.314.660		51.717,85	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah surat pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT		220	100.000.000	200	99.510.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar		550	275.000.000	500	49.999.900	-	58.273.000	-	116,55	-	58.273.000	-	21,19	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT	Jumlah penerbitan pendaftaran kapal		550	275.000.000	500	49.999.900	-	58.273.000	-	116,55	-	58.273.000	-	21,19	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1243385	32.728.577.394	1195104	3.022.814.500	255.399	58.273.000	21,37	1,93	255.399	58.273.000	20,54	0,18	Dislutkan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersedia		3	120.301.967	3	2.310.000	-	2.310.000	-	100,00	-	2.310.000	-	1,92	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi Pembinaan untuk Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		7	748.200.988	6	230.399.900	-	9.245.900	-	4,01	-	9.245.900	-	1,24	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah kegiatan bimbingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran		5	547.427.611	5	230.399.900	-	9.245.900	-	4,01	-	9.245.900	-	1,69	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		384270	200.773.377	348544	22.294.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha bidang penyediaan sarana logistik ikan yang terpantau		15	60.222.089	15		-	-	-		-	-	-	-	
	Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah	Jumlah pelaku usaha yang menerima insentif dan fasilitasi		35	60.222.089	35	22.294.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
					571.511.637.767				19.435.064.769	45,91	59,05		19.435.064.769			
Sasaran : Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		100										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	257.570.105.057	85	151.146.216.860	-	30.830.867.812	20,00	20,40	-	30.830.867.812	-		Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					186.631.633.972		88.670.962.659	-	9.679.025.305		10,92	-	9.679.025.305		5,19	
	Pengembangan Rumah Sakit				8.139.749.202		12.048.544.000	-	546.890.000		4,54	-	546.890.000		6,72	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				170.209.852.752		58.214.978.076	-	8.690.199.144		14,93	-	8.690.199.144		5,11	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				142.282.816		63.700.000	-	4.000.000		6,28	-	4.000.000		2,81	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				8.139.749.202		9.456.610.800	-	99.871.750		1,06	-	99.871.750		1,23	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					402.662.974		875.799.278	-	272.409.865		31,10	-	272.409.865		67,65	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				402.662.974		780.563.278	-	223.919.865		28,69	-	223.919.865		55,61	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					26.643.684.496		88.670.962.659	-	9.679.025.305		10,92	-	9.679.025.305		36,33	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				22.698.881.872		6.988.666.000	-	-		-	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar							-	-			-	-			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti	Orang	240	6.214.478.214	80	7.229.588.110	-	2.212.632.130	-	30,61	-	2.212.632.130	-	35,60	
	Pengasuhan						60.000.000	-	25.000.000		41,67	-	25.000.000			
	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Terlantar yang di penuhi kebutuhan permakanan di dalam panti	Orang	240	185.009.312	80	1.950.300.000	-	740.450.000	-	37,97	-	740.450.000	-	400,22	
	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	240	3.397.588.096	80	119.750.000	-	45.850.000	-	38,29	-	45.850.000	-	1,35	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar di penuhi kebutuhan sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti	Orang	240	222.381.193	80	160.965.000	-	62.663.800	-	38,93	-	62.663.800	-	28,18	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti	Orang	240	37.618.560	80	78.430.910	-	18.322.800	-	23,36	-	18.322.800	-	48,71	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti	Orang	240	863.561.800	80	1.119.618.200	-	367.500.530	-	32,82	-	367.500.530	-	42,56	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						375.160.000	-	118.595.000		31,61	-	118.595.000			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang di berikan layanan reunifikasi keluarga di dalam panti	Orang	240	1.156.801.559	80	330.000.000	-	28.920.000	-	8,76	-	28.920.000	-	2,50	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan	10	351.517.693	10	3.035.364.000	-	805.330.000	-	26,53	-	805.330.000	-	229,10	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumah Lanjut Usia Terlantar yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti	Orang	50	3.603.990.652	50	2.553.865.000	-	976.369.707	-	38,23	-	976.369.707	-	27,09	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	50	2.079.159.318	50	1.768.468.000	-	717.717.507	-	40,58	-	717.717.507	-	34,52	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan sandang dalam Panti	Orang	50	94.354.749	50	114.061.400	-	82.768.200	-	72,56	-	82.768.200	-	87,72	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan asrama dalam Panti	Orang	50	676.825.734	50	211.464.100	-	47.121.000	-	22,28	-	47.121.000	-	6,96	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan Alat Bantu dalam Panti	Orang	50	46.252.328	50	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan kesehatan dalam Panti	Orang	50	262.469.628	50	158.427.500	-	42.790.000	-	27,01	-	42.790.000	-	16,30	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang	50	217.077.593	50	123.200.000	-	37.500.000	-	30,44	-	37.500.000	-	17,27	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang	50	22.201.117	50	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan reunifikasi dalam Panti	Orang	50	165.429.160	50	124.150.000	-	41.375.000	-	33,33	-	41.375.000	-	25,01	
	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan pemulasaraan dalam Panti	Orang	50	40.221.024	50	43.294.000	-	7.098.000	-	16,39	-	7.098.000	-	17,65	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti	Orang	300	17.011.658.368	100	886.499.500	-	138.815.000	-	15,66	-	138.815.000	-	0,82	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	300	2.987.823.305	100	485.975.000	-	86.940.000	-	17,89	-	86.940.000	-	2,91	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang	300	150.242.979	100	48.725.000	-	3.375.000	-	6,93	-	3.375.000	-	2,25	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dan sarana/ prasaranan dalam Panti	Orang	300	48.333.683	100	15.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Panti	Orang	300	23.010.533	100	7.462.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang	300	305.265.365	100	49.500.000	-	16.500.000	-	33,33	-	16.500.000	-	5,41	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang	300	12.148.998.487	100	1.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keterampilan dasar dalam Panti	Orang	300	1.014.467.729	100	171.000.000	-	32.000.000	-	18,71	-	32.000.000	-	3,15	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	300	92.504.656	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan	6	241.011.631	2	78.162.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.264.230.300		1.493.472.600	-	642.399.200		43,01	-	642.399.200			
	Penyediaan Permakanan						402.791.400	-	224.317.100		55,69	-	224.317.100			
	Penyediaan Sandang						90.400.000	-	66.400.000		73,45	-	66.400.000			
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses						43.938.400	-	18.924.900		43,07	-	18.924.900			
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						36.678.600	-	32.260.000		87,95	-	32.260.000			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						42.552.000	-	21.060.000		49,49	-	21.060.000			
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						3.600.000	-	-		-	-	-			
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						395.132.200	-	247.747.200		62,70	-	247.747.200			
	Pemulangan ke Daerah Asal						178.000.000	-	31.690.000		17,80	-	31.690.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				1.264.230.300		300.380.000	-	-		-	-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612	100	11.383.302.500	-	894.800.000	7,00	7,86	-	894.800.000	-	2,40	Dinsos
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		39	273.166.558	13	88.590.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah pengangkatan anak antar WNI		30	78.519.802	10	25.464.600	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal		9	194.646.756	3	63.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah data kemiskinan yang termutakhirkan	KK	310700	37.010.749.054	304300	11.320.177.000	-	894.800.000	-	7,90	-	894.800.000	-	2,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah data fakir miskin daerah cakupan provinsi yang terverifikasi dan validasi	KK	301100	978.390.913	301100		-	-	-		-	-	-	-	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir miskin yang tertangani melalui bantuan sosial	KK	6000	27.061.626.611	2000	8.129.177.000	-	574.800.000	-	7,07	-	574.800.000	-	2,12	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah KK Fakir miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	KK	3600	8.970.731.530	1200	3.191.000.000	-	320.000.000	-	10,03	-	320.000.000	-	3,57	
					350.608.073.348		177.578.292.070		36.349.465.558	20,00	20,42		36.349.465.558	-	25,40	
Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,2		86,2										
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	86,62	770.871.786	71,97	215.000.000	72	215.000.000	100	100	71,97	215.000.000	83,09	27,89	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Unit	9	770.871.786	2	215.000.000	2	215.000.000	100,00	100,00	2,00	215.000.000	22,22	27,89	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Unit	6	594.908.418	2	215.000.000	2	215.000.000	100,00	100,00	2,00	215.000.000	33,33	36,14	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit	1	45.000.000	0	-	-	-			-	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	2	130.963.367	0	-	-	-			-	-	-	-	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466.150.864	100	3.517.365.780	100	371.459.100	100	10,56	100,0	371.459.100	100,00	3,24	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/ Tahun	8294,57	1.074.342.980	7787,81	256.184.980	7.788	93.235.880	100,00	36,39	7.787,8	93.235.880	93,89	8,68	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	6	303.393.880	2	93.235.880	2	93.235.880	100,00	100,00	2,00	93.235.880	33,33	30,73	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	25	230.000.000	0	-	-	-			-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	6	265.000.600	2	75.000.600	2	75.000.600	100,00	100,00	2,00	75.000.600	33,33	28,30	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	Unit	3	275.948.500	1	87.948.500	1	87.948.500	100,00	100,00	1,00	87.948.500	33,33	31,87	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	25,08305648	1.018.510.000	12,720764	208.510.000	13	208.510.000	100,00	100,00	12,72	208.510.000	50,71	20,47	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	151	1.018.510.000	15	208.510.000	15	208.510.000	100,00	100,00	15,00	208.510.000	9,93	20,47	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Persen	90	9.373.297.884	90	3.052.670.800	90	3.052.670.800	100,00	100,00	90,00	3.052.670.800	100,00	32,57	
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	3	242.509.084	1	67.080.000	1	67.080.000	100,00	100,00	1,00	67.080.000	33,33	27,66	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	KRPL/P2L	144	9.130.788.800	62	2.985.590.800	62	2.985.590.800	100,00	100,00	62,00	2.985.590.800	43,06	32,70	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	11.865.261.619	94	3.644.234.400	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					11.865.261.619		3.644.234.400,00	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.865.261.619		3.644.234.400,00	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.290.665.869	84392,8	276.470.779.904	-	107.901.720.540	39,00	39,03	-	107.901.720.540	-	18,37	Dinas Perkim
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Perencanaan dan penanganan PSU Permukiman yang terlaksana	Ha	978	587.290.665.869	84	276.470.779.904	-	107.901.720.540	-	39,03	-	107.901.720.540	-	18,37	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman	Dokumen	3	1.029.079.161	1	389.500.000	-	117.591.100	-	30,19	-	117.591.100	-	11,43	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman	Paket	2931	586.261.586.708	1600	276.081.279.904	-	107.784.129.440	-	39,04	-	107.784.129.440	-	18,38	
					599.155.927.488		#REF!		107.901.720.540	39,00	36,82		107.901.720.540	29,47	9,19	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%	99,99		99,77										
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.991.688.898	5,96	174.222.820	-	67.344.600	-	38,65	-	67.344.600		3,38	Dinas ESDM
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, dan PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) sebagai BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN sampai dengan (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Jumlah Izin	Izin	6	214.456.006	1	26.095.220	-	18.539.600	-	71,05	-	18.539.600	-	8,64	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	6	131.729.920	1	14.450.610	-	10.319.600	-	71,41	-	10.319.600	-	7,83	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin	6	82.726.086	1	11.644.610	-	8.220.000	-	70,59	-	8.220.000	-	9,94	
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI		Unit	Unit	46	1.667.873.204	1	148.127.600	-	48.805.000	-	32,95	-	48.805.000	-	2,93	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	356.100.249	1	70.127.600	-	10.969.000	-	15,64	-	10.969.000	-	3,08	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	Orang	300	268.073.492	100	48.000.000	-	20.356.000	-	42,41	-	20.356.000	-	7,59	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	46	1.043.699.463	1	30.000.000	-	17.480.000	-	58,27	-	17.480.000	-	1,67	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99,99	5.546.102.425	99,77	1.362.655.400	100	97.005.100	100	7,12	99,98	97.005.100	99,99	1,75	Dinas ESDM

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA dan PENJUALAN TENAGA LISTRIK serta PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah Izin	Izin	90	285.942.199	28	36.574.200	26	22.638.200	92,86	61,90	26,00	22.638.200	28,89	7,92	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	90	178.715.304	28	19.574.900	26	14.964.900	92,86	76,45	26,00	14.964.900	28,89	8,37	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin	Izin	90	107.226.895	28	16.999.300	26	7.673.300	92,86	45,14	26,00	7.673.300	28,89	7,16	
PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI yang FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan	Izin	90	285.885.367	13	13.483.300	6	8.194.500	46,15	60,78	6,00	8.194.500	6,67	2,87	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	90	178.694.216	13	7.994.000	2	7.754.000	15,38	97,00	2,00	7.754.000	2,22	4,34	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	90	107.191.152	13	5.489.300	6	440.500	46,15	8,02	6,00	440.500	6,67	0,41	
PENGANGGARAN untuk KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL dan PEDESAAN		Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS	2900	4.807.801.220	800	1.312.597.900	-	66.172.400	-	5,04	-	66.172.400	-	1,38	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	268.073.492	1	42.500.000	-	9.450.000	-	22,24	-	9.450.000	-	3,53	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun	RTS	2900	4.539.727.728	800	1.270.097.900	-	56.722.400	-	4,47	-	56.722.400	-	1,25	
					7.537.791.323		#REF!		164.349.700	32,43	43,84		164.349.700	49,99	3,78	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		62,65										
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.063.959.946	100	1.011.015.400	-	178.904.900	1,00	17,70	-	178.904.900	-	2,53	Dinas Perkim
		Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91		98,81		-	-	-		-	-	-		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Cakupan rumah terdampak bencana yang terdata dan terverifikasi	%	100	1.227.471.539	100	184.077.000	-	79.694.000	43,00	43,29	-	79.694.000	-	6,49	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen perndataan rumah terdampak bencana	dok	3	620.411.785	1	71.903.400	-	33.617.500	-	46,75	-	33.617.500	-	5,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan		7	70.705.716	6	26.508.200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Jumlah Dokumen Pendukung Ekspor yang diterbitkan Bagi Eksportir		120	-	0	-	-	-			-	-	-		
	Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah Calon Eksportir Penerbitan SKA Terlayani		120	-	0	-	-	-			-	-	-		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179.316.326	4	1.572.916.900	4	43.960.000	100	2,79	4,00	43.960.000	100,00	0,85	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi		22	87.022.420	22	22.579.400	44	8.480.000	200,00	37,56	44,00	8.480.000	200,00	9,74	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan		8	43.511.210	6	14.133.700	2	4.240.000	33,33	30,00	2,00	4.240.000	25,00	9,74	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting yang dilaksanakan		8	43.511.210	6	8.445.700	2	4.240.000	33,33	50,20	2,00	4.240.000	25,00	9,74	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		22	1.717.060.899	22	1.550.337.500	44	35.480.000	200,00	2,29	44,00	35.480.000	200,00	2,07	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		22	97.900.005	22	61.837.500	44	4.240.000	200,00	6,86	44,00	4.240.000	200,00	4,33	
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilitas Harga Bapok		13	1.619.160.895	9	1.488.500.000	2	31.240.000	22,22	2,10	2,00	31.240.000	15,38	1,93	
Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Stok Pupuk Pestisida yang Terkendali		0	-			-	-			-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		0	-			-	-			-	-			
	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi Pupuk Terperiksa		0	-			-	-			-	-			
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Stok Pengadaan Pupuk dan Pestisida Terawasi		0	-			-	-			-	-			
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Stok Pupuk dan Pestisida Tersalurkan		0	-			-	-			-	-			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.070.555.572	3	903.456.900	2	16.760.000	70,00	1,86	2,10	16.760.000	30,00	0,41	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang		6	1.417.874.666	4	903.456.900	-	16.760.000	-	1,86	-	16.760.000	-	1,18	
	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah UKM yang ikut Pameran		10	602.039.482	6	453.456.900	-	16.760.000	-	3,70	-	16.760.000	-	2,78	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina		30	163.167.037	2	0	-	-	-		-	-	-	-	
	Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang		10	163.167.037	6	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara		2	326.334.074	2	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor Terpilih		4	163.167.037	30	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Termasuk: Rumah Kemasan)		Cakupan Penyelesaian Sengketa	Persen	90	3.914.544.303	80	580.292.500	65	266.075.000	81,25	45,85	65,00	266.075.000	72,22	6,80	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	Kasus	50	1.022.513.104	40	414.531.200	25	252.095.000	62,50	60,81	25,00	252.095.000	50,00	24,65	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen Tersosialisasi Konsumen Cerdas dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Orang	60	108.778.025	100	56.751.300	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	Lembaga	300	97.900.005	4	300.279.900	4	250.000.000	100,00	83,26	4,00	250.000.000	1,33	255,36	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang di Koordinasikan Ke BPSK Kab/Kota	Kasus	8	815.835.075	50	57.500.000	50	2.095.000	100,00	3,64	50,00	2.095.000	625,00	0,26	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi	60	261.066.932	1	10.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Terverifikasi Mutu	Produk	20	97.900.005	2	10.224.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	Toko/Retail	110	163.166.928	50	155.537.300	-	13.980.000	-	8,99	-	13.980.000	-	8,57	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Barang Beredar dan Jasa Yang Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Barang	3	79.952.066	100	149.999.900	100	13.980.000	100,00	9,32	100,00	13.980.000	3.333,33	17,49	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang Direkomendasikan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen	Konsumen	2	79.952.066	10	5.537.400	8	-	80,00	-	8,00	-	400,00	-	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550.068.505	100	11.032.471.600	100	347.440.000	100	3,15	100	347.440.000	100,00	0,93	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi		60	12.046.221.585	20	10.217.331.600	20	60.330.000	100,00	0,59	20,00	60.330.000	33,33	0,50	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana		4	12.046.221.585	2	10.217.331.600	-	60.330.000	-	0,59	-	60.330.000	-	0,50	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan		14	935.491.011	10	809.640.000	10	285.860.000	100,00	35,31	10,00	285.860.000	71,43	30,56	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana		4	935.491.011	2	809.640.000	4	285.860.000	200,00	35,31	4,00	285.860.000	100,00	30,56	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UKM Terakomodir di Retail		50	97.900.222	15	5.500.000	15	1.250.000	100,00	22,73	15,00	1.250.000	30,00	1,28	
	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana		2	81.583.518	2	0	-	-	-		-	-	-	-	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing		40000	16.316.704	30.000	5.500.000	18.836	1.250.000	62,79	22,73	18.836	1.250.000	47,09	7,66	
					51.588.894.563		14.193.646.100		674.235.000	51,14	20,50		674.235.000	134,74	10,70	
Sasaran : Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11943,70147		11273,02										
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.833.875.000	100	4.416.874.800	30	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan		10	4.029.002.055	10	3.671.874.800	2	-	20,00	-	2,00	-	20,00	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Jenis Bantuan Sarana Prasarana		9	3.865.835.018	9	3.521.874.800	1	-	11,11	-	1,00	-	11,11	-	
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas		0	-	2	150.000.000	1	-	50,00	-	1,00	-			
					4.833.875.000		4.416.874.800		-	30,00	-	-25,3333333	-	30,00	-	
Tujuan : Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4,5		1,5		-0,38	-25,3333333		-25,3333333		-8,444444444			
Sasaran : Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137,24		122,71										
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580.012.830	65,66	3.183.927.200	-	122.523.400	3,80	3,85	-	122.523.400	-	0,74	Dinas Pariwisata
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	37,5		-	-	-		-	-	-		
Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi					80.864.671		49.805.500	-	40.588.900		81,49	-	40.588.900		50,19	
	Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah workshop paket wisata	kali	2	80.864.671	2	49.805.500	-	40.588.900	-	81,49	-	40.588.900	-	50,19	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					5.729.636.512		3.089.183.000	-	51.182.500		1,66	-	51.182.500		0,89	
	Pengembangan destinasi pariwisata provinsi	Jumlah destinasi yang dikembangkan	paket	20	5.729.636.512	20	3.052.000.100	-	14.000.000	-	0,46	-	14.000.000	-	0,24	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					84.435.279		44.938.700	-	30.752.000		68,43	-	30.752.000		36,42	
	Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah paket wisata	paket	2	84.435.279	2	44.938.700	-	30.752.000	-	68,43	-	30.752.000	-	36,42	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.391.905.747	4650000	2.190.531.900	-	117.970.000	5,9	5,39	-	117.970.000		1,60	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah promosi event yang dilaksanakan			2.705.004.086		2.190.531.900	-	117.970.000		5,39	-	117.970.000		4,36	
	Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi	media	12	2.572.419.576	10	2.121.400.000	-	100.000.000	-	4,71	-	100.000.000	-	3,89	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Facilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah fasilitas kegiatan pemasaran yang dilaksanakan	kegiatan	8	43.452.138	5	28.184.900	-	7.770.000	-	27,57	-	7.770.000	-	17,88	
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah jenis dokumen penyediaan data dan informasi	dokumen	2	40.831.961	2	20.947.000	-	10.200.000	-	48,69	-	10.200.000	-	24,98	
	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah mitra di dalam dan di luar negeri	lokasi	10	48.300.412	10	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		606.633.173	30,21148	100.899.900	-	17.400.000	18,00	17,24	-	17.400.000		2,87	Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					232.043.419		100.899.900	-	17.400.000		17,24	-	17.400.000		7,50	
	Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik	Jumlah produk yang dipasarkan	produk	10	76.079.809	10	32.000.000	-	4.350.000	-	13,59	-	4.350.000	-	5,72	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	Jumlah ruang kreasi dan orang kreatif yang terdata	orang	10	102.285.077	10	44.799.900	-	10.650.000	-	23,77	-	10.650.000	-	10,41	
	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula	Jumlah usaha kreatif bagi pemula yang terdata	usaha	10	53.678.532	10	24.100.000	-	2.400.000	-	9,96	-	2.400.000	-	4,47	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506.228.054	60	965.920.300	-	12.764.500	1,40	1,32	-	12.764.500		0,36	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah pelaku wisata yang dilatih			1.283.073.884		965.920.300	-	12.764.500		1,32	-	12.764.500		0,99	
	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Jumlah SDM yang terlatih	orang	150	1.041.571.944	150	862.578.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata	Jumlah pokdarwis	pokdarwis	20	122.972.729	40	52.846.200	-	4.564.500	-	8,64	-	4.564.500	-	3,71	
	Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan	Jumlah pelaku wisata yang dilatih	orang	130	118.529.211	50	50.496.000	-	8.200.000	-	16,24	-	8.200.000	-	6,92	
					28.084.779.803		#REF!		270.657.900	7,73	24,14		270.657.900	-	0,96	
Tujuan : Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri (%)	%	9		6,5										
Sasaran : Meningkatnya daya saing industri		Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	179,91		166,39										
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223	100	17.878.794.032	-	1.006.426.103	5,80	5,63	-	1.006.426.103	-	0,98	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi			39.971.793.683	-	17.878.794.032	-	1.006.426.103		5,63	-	1.006.426.103		2,52	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya RPIP Prov. NTB	Dokumen		4.949.375.098	-	1.712.374.800	-	31.479.613		1,84	-	31.479.613		0,64	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang terbina	IKM		3.117.355.165	-	830.247.000	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Kapasitas IKM dan Terfasilitasinya Operasional Dekrnasda	Kegiatan		12.964.823.373	-	4.344.911.300	-	500.973.371		11,53	-	500.973.371		3,86	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang terlaksana	Unit		11.039.203.924	-	6.532.453.732	1	315.850.815		4,84	1,00	315.850.815		2,86	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang terbina	IKM		7.594.957.377	-	4.251.521.200	-	59.901.000		1,41	-	59.901.000		0,79	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	Dokumen		306.078.746	-	207.286.000	-	98.221.304	45,00	47,38	-	98.221.304		32,09	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.892	2,69	798.525.000	-	-		-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi			1.179.102.934	-	Rp798.525.000	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin IKM yang terfasilitasi			1.058.448.377	-	Rp716.814.000	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase pengawasan perizinan yang terfasilitasi			120.654.557	-	Rp81.711.000	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043.024.494	1	540.498.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			798.099.969	-	Rp540.498.000	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen yang tersusun			293.542.402	-	Rp198.796.000	-	-		-	-	-		-	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen yang tersusun			224.983.811	-	Rp152.366.000	-	-		-	-	-		-	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah temu mitra yang terlaksana			279.573.755	-	Rp189.336.000	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,714079074	4.806.536.363	5,990839	907.047.500	-	180.306.958	21,00	19,88	-	180.306.958	-	3,75	Diskop UMKM
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Kecil yang dibina				30	907.047.500	-	180.306.958	-	19,88	-	180.306.958			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Usaha Kecil yang dibina				30	907.047.500	-	180.306.958	-	19,88	-	180.306.958			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,74518201	7.967.004.066	50,321199	1.916.058.400	-	317.334.400	17,00	16,56	-	317.334.400	-	3,98	Diskop UMKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan					1.916.058.400	-	317.334.400		16,56	-	317.334.400			
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan					1.916.058.400	-	317.334.400		16,56	-	317.334.400			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332	100	1.530.922.250	30	489.472.727	30,00	31,97	30,00	489.472.727	30,00	4,33	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	480	11.196.717.332	0	1.530.922.250	-	489.472.727		31,97	-	489.472.727	-	4,37	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi (Orang)	Orang	45	534.060.283	0	12.000.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih (Orang)	Orang	300	479.287.279	0	2.130.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	Orang	1200	1.799.106.230	0	13.470.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan (Orang)	Orang	6	971.920.387	0	156.937.250	-	89.472.727		57,01	-	89.472.727	-	9,21	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga	60	7.175.198.742	20	1.345.705.000	1	400.000.000	5,00	29,72	1,00	400.000.000	1,67	5,57	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	Orang	180	237.144.411	0	680.000	1	-		-	1,00	-	0,56	-	
Sasaran : Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	131.453.832.370	3,3	#REF!		1.993.540.188	19,80	19,90		1.993.540.188	-	1,52	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.780	16	612.275.700	5	18.294.200	28,13	2,99	4,50	18.294.200	25,00	0,53	Disnakertrans
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi		300	1.092.070.448	150	583.610.900	-	14.840.200	-	2,54	-	14.840.200	-	1,36	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri (Induk)		300	1.092.070.448	150	583.610.900	-	14.840.200	-	2,54	-	14.840.200	-	1,36	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai		40	147.454.000	20	23.454.000	18	3.454.000	90,00	14,73	18,00	3.454.000	45,00	2,34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi (Induk)		40	147.454.000	20	23.454.000	18	3.454.000	90,00	14,73	18,00	3.454.000	45,00	2,34	
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi (BLKDLN)		160	2.044.288.965	96	533.154.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri (BLK)		160	2.044.288.965	96	533.154.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal)		5	92.804.380	100	5.210.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal) (BLKDLN)		5	92.804.380	5	5.210.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391.251.944	44,71	714.466.230	1	197.332.300	1,34	27,62	0,60	197.332.300	1,04	5,82	Disnakertrans
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		160	910.699.800	160	100.276.600	60	6.300.000	37,50	6,28	60,00	6.300.000	37,50	0,69	
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.		160	910.699.800	160	100.276.600	60	6.300.000	37,50	6,28	60,00	6.300.000	37,50	0,69	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair		2000	388.974.000	1500	97.477.800	-	2.952.500	-	3,03	-	2.952.500	-	0,76	
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair		2000	388.974.000	1500	97.477.800	-	2.952.500	-	3,03	-	2.952.500	-	0,76	
Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.		27253	1.995.499.514	23460	514.633.200	438	188.079.800	1,87	36,55	438,00	188.079.800	1,61	9,43	
	Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani		1600	618.360.000	1900	94.120.000	438	59.384.200	23,05	63,09	438,00	59.384.200	27,38	9,60	
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI Ke Luar Negeri Yang Dilayani Di LTSA		27500	1.033.252.214	21500	305.884.100	-	128.695.600	-	42,07	-	128.695.600	-	12,46	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan		253	343.887.300	60	114.629.100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan		80	96.078.630	25	2.078.630	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan		80	96.078.630	25	2.078.630	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	1.025.630.908	21	217.995.600	17	62.834.500	81,33	28,82	17,08	62.834.500	74,26	6,13	Disnakertrans
Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina		90	743.997.600	70	135.999.200	41	54.844.500	58,57	40,33	41,00	54.844.500	45,56	7,37	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang bina		90	447.631.500	70	70.710.500	27	37.874.500	38,57	53,56	27,00	37.874.500	30,00	8,46	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTripartit		11	296.366.100	11	65.288.700	14	16.970.000	127,27	25,99	14,00	16.970.000	127,27	5,73	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)		Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.		11	281.633.308	11	81.996.400	10	7.990.000	90,91	9,74	10,00	7.990.000	90,91	2,84	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan		11	281.633.308	11	81.996.400	10	7.990.000	90,91	9,74	10,00	7.990.000	90,91	2,84	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.656	21	799.742.000	7	141.616.000	34,67	17,71	7,28	141.616.000	31,65	4,09	Disnakertrans
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3		1070	3.466.483.654	650	799.742.000	90	141.616.000	13,85	17,71	90,00	141.616.000	8,41	4,09	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya (Induk)		90	269.601.295	20	161.343.900	-	52.840.000	-	32,75	-	52.840.000	-	19,60	
		Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya di Pulau Lombok (UPTD BPKPL)		100	320.895.558	20		23	-	115,00		23,00	-	23,00	-	
		Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya di Pulau Sumbawa (UPTD BPKPS)		20	232.905.050	20		9	-	45,00		9,00	-	45,00	-	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya (Induk)		90	319.634.697	20	120.651.300	-	26.910.000	-	22,30	-	26.910.000	-	8,42	
		Jumlah Perusahaan yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerjanya di Pulau Sumbawa (UPTD BPKPS)		90	219.346.694	20		3	-	15,00		3,00	-	3,33	-	
	Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya (Induk)		90	350.935.019	25	517.746.800	46	61.866.000	184,00	11,95	46,00	61.866.000	51,11	17,63	
		Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja yang diperiksa Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya di Pulau Lombok (UPTD BPKPL)		500	1.521.653.119	500		-	-	-		-	-	-	-	
		Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja yang diperiksa Keselamatan dan Kesehatan Kerjanya di Pulau Sumbawa (UPTD BPKPS)		90	231.512.222	25		9	-	36,00		9,00	-	10,00	-	
					11.365.358.289		#REF!		420.077.000	34,46	20,67		420.077.000	23,65	3,70	
Misi NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan																
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Kriminalitas	Point	13,25		14,85										
Sasaran : Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%	0		16,67										
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.849	10	145.200.000	10	56.860.000	100	39,16	10,00	56.860.000	100,00	3,72	Bakesbangpold agri

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan ideologi wawasan kebangsaan pada daerah rawan konflik	Orang	200	562.456.541	200	145.200.000	-	56.860.000	-	39,16	-	56.860.000	-	10,11	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Tenaga Administrasi Non PNS	Orang	1	-	0	17.500.000	2	12.500.000		71,43	2,00	12.500.000			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumah peserta pelaksanaan koordinasi di Bidang Wasbang	Orang	200	383.444.004	200	110.000.000	-	30.760.000	-	27,96	-	30.760.000	-	8,02	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	146.337.289	1	17.700.000	1	13.600.000	100,00	76,84	1,00	13.600.000	100,00	9,29	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927	10	3.877.815.000	-	1.764.707.000	-	45,51	-	1.764.707.000	-	15,89	Bakesbangpold agri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan	Orang	85	3.191.596.561	50	3.877.815.000	-	1.764.707.000	-	45,51	-	1.764.707.000	-	55,29	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jejaring Deteksi Dini	Orang	85	855.085.702	50	1.385.080.000	50	256.000.000	100,00	18,48	50,00	256.000.000	58,82	29,94	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Mediasi Konflik	Kali	20	303.454.832	20	82.755.000	5	4.957.000	25,00	5,99	5,00	4.957.000	25,00	1,63	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	125.732.088	1	102.270.000	2	51.500.000	200,00	50,36	2,00	51.500.000	200,00	40,96	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rekomendasi	6	1.907.323.939	6	2.307.710.000	6	1.452.250.000	100,00	62,93	6,00	1.452.250.000	100,00	76,14	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	75.882.583.200	4	15.556.150.760	3,84	20,50	3,84	15.556.150.760	3,84	5,32	Biro Kesra

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali)		Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual		2385	100.348.573.728	790	26.332.123.200	32	3.538.600.860	4,05	13,44	32,00	3.538.600.860	1,34	3,53	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali)	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		2370	89.954.926.705	785	23.643.855.200	30	2.929.532.860	3,82	12,39	30,00	2.929.532.860	1,27	3,26	
	Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi		5	10.393.647.022	5	2.688.268.000	-	609.068.000	-	22,66	-	609.068.000	-	5,86	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar		45	190.236.028.124	15	49.353.313.100	-	11.976.864.600	-	24,27	-	11.976.864.600	-	6,30	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		12	186.708.519.065	4	48.967.735.500	-	11.905.578.400	-	24,31	-	11.905.578.400	-	6,38	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		24	3.025.514.118	8	345.137.000	-	66.371.000	-	19,23	-	66.371.000	-	2,19	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial		9	501.994.941	3	40.440.600	-	4.915.200	-	12,15	-	4.915.200	-	0,98	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		9	2.058.471.946	3	197.146.900	-	40.685.300	-	20,64	-	40.685.300	-	1,98	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		3	855.856.277	1	106.131.400	-	27.825.300	-	26,22	-	27.825.300	-	3,25	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		3	424.296.999	1	29.498.400	-	2.277.700	-	7,72	-	2.277.700	-	0,54	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		3	778.318.670	1	61.517.100	-	10.582.300	-	17,20	-	10.582.300	-	1,36	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519.090.462	60	6.205.952.900	-	1.125.843.000	-	18,14	-	1.125.843.000	-	4,59	DPMPPD Dukcapil
		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	14,43		-	-	-		-	-	-		
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	60		-	-	-		-	-	-		
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-	47,86		-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	480	24.783.684.000	150	6.205.952.900	-	1.125.843.000	-	18,14	-	1.125.843.000	-	4,54	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	orang	390	2.019.811.000	30	157.750.000	30	149.996.000	100,00	95,08	30,00	149.996.000	100	7,43	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1) Jumlah Hibah uang ke PKK 2) Jumlah Peserta Bimtek Aplikasi SIP 3) Posyandu Juara 4) Jumlah Peserta Rakor Pokjanal Posyandu 5) Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan posyandu	1) Kali 2) Desa 3) Posyandu 4) Orang 5) Desa	1)1 2) 1.184 3) 18 4) 120 5) 90	3.269.977.000	1) 1 2) 394 3) 6 4) 40 5) 30	1.974.499.800	-	847.401.900		42,92	-	847.401.900	-	25,91	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1) Jumlah desa yang mendapat bantuan mesin untuk pengembangan usaha BUMDes, 2) Jumlah peserta Bimtek pengelolaan manajemen BUMDes, 3) Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes	1) Desa 2) Orang 3) Desa	1). 303 2). 174 3). 303	15.760.301.000	1). 101 2). 58 3). 101	3.963.352.000	1)2)3) 50	95.953.000	49,50	2,42	1)2)3) 50	95.953.000		0,61	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kali	5	642.415.000	4	110.351.100	1	32.492.100	25,00	29,44	1,00	32.492.100		5,06	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759	63,64	1.854.991.000	-	197.685.600	-	10,66	-	197.685.600	-	3,09	Dikbud
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					913.426.285		557.743.000	-	127.995.600		22,95	-	127.995.600	-	14,01	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				464.992.000		97.707.000	-	53.840.600		55,10	-	53.840.600	-	11,58	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				448.434.285		460.036.000	-	74.155.000		16,12	-	74.155.000		16,54	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							1.045.910.000	-	69.690.000		6,66	-	69.690.000	-		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						1.045.910.000	-	69.690.000		6,66	-	69.690.000	-		
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					901.771.154		251.338.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				63.450.607		14.338.000	-	-		-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				194.546.962		55.000.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				643.773.584		182.000.000	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736	100	208.523.100	-	-		-	-	-	-	-	Dikbud
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.426.928.736		208.523.100	-	-		-	-	-	-	-	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				1.426.928.736		208.523.100	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	104.190.000	-	13.227.500	-	12,70	-	13.227.500	-	1,84	Dikbud
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					719.796.541		104.190.000	-	13.227.500		12,70	-	13.227.500		1,84	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				78.580.447		13.969.000	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				641.216.094		90.221.000	-	13.227.500		14,66	-	13.227.500	-	2,06	
					337.626.326.533		#REF!		18.701.246.360	25,35	23,23		18.701.246.360	15,69	5,54	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		5,41										
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	11.445.268.038	100	2.661.636.800	100	486.041.700	100,00	18,26	100	486.041.700	100,00	4,25	Satpol PP
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100		100		-	-	-		-	-	-		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	5.810.081.702	17	49.927.100	3	11.934.800	17,65	23,90	3,00	11.934.800	20,00	0,21	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	Kali	36	2.401.255.636	12	447.976.700	3	158.098.400	25,00	35,29	3,00	158.098.400	8,33	6,58	
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah			10		-	-	-		-	-			
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan			10		-	-	-		-	-			
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					10	252.300.000	-	25.770.000	-	10,21	-	25.770.000			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			15	1.008.191.008	17	71.914.300	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	7	287.369.602	2	169.680.100	-	41.867.600	-	24,67	-	41.867.600	-	14,57	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			450	678.041.819	400	257.232.400	-	115.317.800	-	44,83	-	115.317.800	-	17,01	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			2060	1.027.900.882	675	257.232.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					50	52.005.500	-	-	-	-	-	-			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				3	199.508.733	1	1.195.874.200	-	133.053.100	-	11,13	-	133.053.100	-	66,69	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			6	-		350.201.200	-	29.438.100		8,41	-	29.438.100	-		
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			2	-		645.673.100	-	65.250.000		10,11	-	65.250.000	-		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			36	207.814.021	12	199.999.900	-	38.365.000	-	19,18	-	38.365.000	-	18,46	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				120	458.447.988	40	164.726.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						114.726.700	-	-		-	-	-			
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS			5	199.799.242	1	49.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.436.780.947	51,72	482.050.000	-	250.406.000	50,00	51,95	-	250.406.000	-	10,28	Bakesbangpold agri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar	Desa	10	848.629.511	10	482.050.000	-	250.406.000	50,00	51,95	-	250.406.000	-	29,51	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tim Terpadu P4GN	Orang	26	354.342.992	26	35.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	Lembaga	2	-	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung madani	Desa	2	253.260.060	2	286.125.000	2	197.506.000	100,00	69,03	2,00	197.506.000	100,00	77,99	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	24.102.645.863	1	150.415.000	1	52.900.000	100,00	35,17	1,00	52.900.000	100,00	0,22	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.727.596.769,70	100	750.111.700	86	466.804.262	85,81	62,23	85,81	466.804.262	85,81	8,15	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		100		-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
Fasilitasi Penyusunan Perundang- undangan		Jumlah fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama		2877	3.900.653.457,15	959	509.547.700	531	303.921.562	55,37	59,65	531,00	303.921.562	-	7,79	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda dab Pergub	30	937.240.588,17	10	150.000.000	6	90.544.900	60,00	60,36	6,00	90.544.900	20,00	9,66	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept Gub	2100	468.619.122,53	700	55.094.400	370	27.186.000	52,86	49,34	370,00	27.186.000	17,62	5,80	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan ersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda/ Pergub	132	1.222.824.591,97	44	140.800.900	29	79.282.000	65,91	56,31	29,00	79.282.000	21,97	6,48	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	75		25		37	-	148,00		37,00	-	49,33		
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	150	1.271.969.154,48	50	163.652.400	25	106.908.662	50,00	65,33	25,00	106.908.662	16,67	8,40	
			Perbup/Perwal	300		100		83	-	83,00		83,00	-	27,67		
Bantuan Hukum dan HAM		Jumlah kasus-kasus hukum yang terfasilitasi	Perkara	33	1.826.943.312,55	11	240.564.000	6	162.882.700	54,55	67,71	6,00	162.882.700	18,18	8,92	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum (Litigasi)	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	12	904.765.524,92	4	151.643.000	4	103.531.000	100,00	68,27	4,00	103.531.000	33,33	11,44	
	Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	12	922.177.787,63	4	88.921.000	2	59.351.700	50,00	66,75	2,00	59.351.700	16,67	6,44	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	9		3		-	-	-		-	-	-		
					19.609.645.754		3.893.798.500		1.203.251.962	31,20	31,29		1.203.251.962	16,73	6,14	
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	85,2		83,74										
Sasaran : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1		0,8										
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528.305.431	80	4.240.041.000	40	693.358.700	50,00	16,35	40,00	693.358.700	40,00	1,59	Bakesbangpold agri

[illegible]

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		18,6										
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100		60										
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					6.231.111.877	52,17	1.396.540.900	-	12.530.000	1,00	0,90	-	12.530.000		0,20	DP3AP2KB
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				132,4	6.125.756.012,01	43,7	1.366.629.900	-	12.530.000	-	0,92	-	12.530.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			90	5.664.674.236,18	30	1.235.726.700	-	-	-	-	-	-			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			135	461.081.837,13	45	130.903.200	-	12.530.000	-	9,57	-	12.530.000			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			115,6	105.355.913,91	38,2	29.911.000	-	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			80	105.355.891,51	25	29.911.000	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				234	1.876.539.031,06	75,52	848.627.900	-	23.605.000	3,00	2,78	-	23.605.000	-	1,26	DP3AP2KB
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			711	285.696.859,20	237	124.250.500	-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			711	285.696.859,20	237	124.250.500	-	-	-	-	-	-			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			40	1.590.842.512,27	15	272.730.000	-	23.605.000	-	8,66	-	23.605.000	-	6,70	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			90	1.238.611.825,60	30	351.647.500	-	23.605.000	-	6,71	-	23.605.000		2,46	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi			1500	352.231.721,68	500	451.647.400	-	23.605.000	-	5,23	-	23.605.000		2,46	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)				960.710.254,07	120,00		-	-	-		-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)				960.710.254,07	120,00		-	-	-		-	-			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.340.778.150	5	380.653.000	-	25.574.000	7,00	6,72	-	25.574.000	-	1,91	DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga				3	380.653.000	-	25.574.000	-	6,72	-	25.574.000			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih				60	263.143.000	-	12.820.000	-	4,87	-	12.820.000			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA				50	117.510.000	-	12.754.000	-	10,85	-	12.754.000			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender	Dok	3	200.537.841,51	1	34.997.400	-	1.688.400	-	4,82	-	1.688.400			DP3AP2KB
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Data Gender dan Anak	Orang	180	200.537.959,51	60	34.997.400	-	1.688.400	-	4,82	-	1.688.400			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak	Orang	180	200.537.959,51	60	34.997.400	-	1.688.400	-	4,82	-	1.688.400			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100	1.490.733.931,84	60	222.467.500	-	5.565.000	3,00	2,50	-	5.565.000			DP3AP2KB
		Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%					-	-			-	-			
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				240	1.490.733.931,84	120	222.467.500	-	5.565.000	-	2,50	-	5.565.000			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Orang	240	706.027.395,85	60	105.266.200	-	5.565.000	-	5,29	-	5.565.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Orang	240	784.706.715,99	60	117.201.300	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		3	2.001.008.090,76	100	374.227.200	5	49.130.000	5,00	13,13	5,00	49.130.000			DP3AP2KB
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif		300		340		-	-	-		-	-			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Berita	240	432.470.345,44	240	69.672.500	-	-	-	-	-	-			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Orang	300	122.860.293,00	100	60.172.500	-	-	-	-	-	-			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Orang	1428	1.568.537.949,31	310	294.554.700	5	49.130.000	1,61	16,68	5,00	49.130.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra OPD pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD sampai Triwulan II 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD/Renstra)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	Orang	228	1.169.139.168,42	10	246.811.100	5	49.130.000	50,00	19,91	5,00	49.130.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	Orang	1200	399.399.868,89	300	47.743.600	-	-	-	-	-	-			
					13.140.708.922				118.092.400	8,83	6,59		118.092.400	-	0,90	